

**FAKTOR- FAKTOR YANG MENDORONG KETERLIBATAN
PIMPINAN ANAK CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR
PEDURUNGAN DALAM PILWAKOT SEMARANG 2015**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1)
Dalam Ilmu Jinayah Siyasa



**Disusun Oleh :
MUHAMAD CHABIB F
NIM 122211049**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Muhamad Chabib F

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu 'alaikum wr. wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:


Nama : Muhamad Chabib F
Nim : 122211049
Jurusan : Siyasah Jinayah
Judul : FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG
KETERLIBATAN PIMPINAN ANAK CABANG GERAKAN
PEMUDA ANSOR PEDURUNGAN DALAM PILWALKOT
SEMARANG 2015

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat dimunaqasahkan.
Demikian harap maklum adanya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Semarang, 31 Mei 2016

Pembimbing I


Dr. H. Abu Hapsin, MA. Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002



Pembimbing II


Dr. H. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 19680505 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III, Telpon/Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhamad Chabib F
NIM : 122211049
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **“FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG
KETERLIBATAN PIMPINAN ANAK CABANG
GERAKAN PEMUDA ANSOR PEDURUNGAN
DALAM PILWAKOT SEMARANG 2015”**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 14 Juni 2016 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2015/2016

Semarang, 16 Juni 2016

Ketua Sidang

Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 19670321 199303 1 005

Sekretaris Sidang

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

Penguji I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 19650605 199203 1 001

Penguji II



Dr. H. Mashudi, M.Ag.
NIP. 19690121 200501 1 002

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph.D
NIP. 19590606 198903 1 002

pembimbing II

Drs. H. Nur Syamsudin, M.Ag.
NIP. 19680505 199503 1 002

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisikan materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan.

Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2016

Deklarator

Muhamad Chabib. F
NIM. 122211049

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian- perjanjian itu”.

(QS. Al- Maidah: 1)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kenyataan dilapangan bahwa salah satu Badan Otonom Nahdlatul Ulama yaitu Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Pedurungan terlibat dalam Pemilihan walikota Semarang 2015 dan juga mendukung kesalah satu calon walikota Semarang. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti tentang faktor dan latar belakang mengapa PAC GP Ansor Pedurungan terlibat pada pilwakot tersebut.

Dalam objek penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Pedurungan dan Pimpinan Cabang Ansor kota Semarang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sudut pandang penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan data primernya diperoleh langsung dari PAC GP Ansor Pedurungan dan data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung melainkan perantara, seperti; buku, dokumen Ansor, dan lain-lain. Teknis analisis data, peneliti menggunakan teknik diskriptif dan fenomenologi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Ansor Pedurungan dalam Pilwakot Kota Semarang 2015 dilatar belakangi dengan adanya ketiadaan contoh tokoh NU, kemudian dikarenakan kedekatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan tepesona Ansor terhadap kinerja Soemarmo. Sedangkan faktor-faktornya, dikarenakan sebuah kepentingan internal maupun eksternal GP Ansor dengan Soemarmo, dan kesepakatan antara GP Ansor dengan Soemarmo untuk memenangkan dalam Pilwakot Semarang. Keterlibatan GP Ansor Pedurungan dalam Pilwakot Semarang 2015 dikarenakan syahwat politik yang cukup tinggi dan keterlibatannya telah melanggar Khittah NU 1926, yang dimana Khittah melarang warga Nahdliyah untuk berpolitik praktis.

Key words: faktor, keterlibatan, GP Ansor, Pilwakot Semarang 2015

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis haturkan ke Illahi Robbi, atas segala kekuatan yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. *Shalawat* dan *Salam* tidak lupa penulis sanjungkan kepada Nabi Agung Muhmmad SAW, atas segala yang dilakukan Beliau Nabi untuk manusia dan alam semesta.

Yang selalu sabar dan tabah Abah-Umiku, yang dengan ikhlas dan tulus penuh pengorbanan, menjadi “darah” dan “roh” yang menghidupiku, maafkan abah umiku bila aku tidak bisa berbuat lebih sesuai dengan harapanmu.

Yang mulia, Kyai Ahmad Anshori, yang dengan ikhlas selalu mendo’akan dan menjadi penunjuk dan pengingat jalanku untuk mencapai kebahagiaan abadi di sisi Tuhan Yang Maha Agung.

Yang ku sayangi Adik-adiku; Tahliyatul Rosikhoh, Ahmad Fatwa, Abdul Hamid dan Tatimussholikah, mereka selalu menjadi kekuatan jiwaku.

Sahabat-sahabat pergerakan yang selalu memberikan motifasi dan inspirasi. Untuk mereka ku persembahkan skripsi ini dengan penuh keikhlasan dan kesadaran.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas segala kasih sayangnya. Dia telah melimpahkan karunia yang sangat besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada beliau Baginda Nabi Muhamad SAW, beserta segenap keluarga dan para sahabatnya hingga akhir nanti.

Dalam penyelesaian skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mendorong Keterlibatan Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Pedurungan Dalam Pilwakot Semarang 2015 ”** tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga. kepada:

1. Bapak Prof. DR. Muhbbin, M.Ag selaku Rektor Unevirsitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang senantiasa menjadi suri tauladan bagi seluruh Mahasiswa.
2. Bapak DR. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang selalu mencurahkan perhatiannya kepada setiap mahasiswa. Khususnya Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak DR. Rokhmadi, M.Ag selaku ketua jurusan Siyasaah Jinayah Fakultas Syari’ah dan Hukum yang selalu memberi motivasi kepada penulis.
4. Bapak Drs. Abu Hapsin, MA, Ph.D selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Dosen, pegawai, dan seluruh civitas akademik di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

6. dr. Solkhan, Ali Munawir, Zamah Asyari, Spd.I, dan Anggota Pimpinan Anak Cabang Ansor Pedurungan yang telah memberikan informasi
7. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a baik moral maupun moriil dengan tulus dan ikhlas, dan mereka "roh" bagiku untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.
8. Adik-adiku; Tahliyatul Rosikhoh, Ahamad Fatwa, Abdul Hamid dan Tatimussolikhah yang selalu penulis sayangi, kalianlah yang selalu membuat penulis semangat, semoga kalian semua menjadi anak yang sholeh dan sholekah, setiap langkah kalian semua mendapatkan ridhonya.
9. Keluarga besar Bani Muhaimin dan Bani Anshori yang telah banyak mengajarkan bagaimana menyikapi kehidupan.
10. saudara Yusuf yang telah ikhlas meminjamkan Laptop dalam menyelesaikan penulisan skripsi
11. sahabat-sahabatku Nahdaltul Fataya dan Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah yang telah mengajarkan banyak berorganisasi. Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang mengajarkan arti kehidupan, kesederhanaan dan kerendahan hati untuk penulis. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari yang mereka berikan kepadaku.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap , semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. *Amin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Semarang, 10 juni 2016

Penulis

Muhamad Chabib F
122211049

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARSI.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II : NU POLITIK PRAKTIS , KHITTAH NU, TIPOLOGI KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM DAN BADAN OTONOM NU.

A. NU dan Politik Praktis	13
B. Khittah NU 1926	22
C. Tipologi Kepemimpinan dalam tradisi Islam.....	39
D. Badan Otonom NU.....	45

BAB III : KETERLIBATAN PAC GP ANSOR PEDURUNGAN DALAM PILWAKOT SEMARANG 2015

A. Keberadaan PAC GP Ansor Pedurungan.....	52
B. Peta Pilwakot Semarang Tahun 2015	55
C. Keterlibatan PAC GP Ansor Pedurungan dalam Pilwakot	59

**BAB IV : ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG
KETERLIBATAN PAC GP ANSOR PEDURUNGAN
DALAM PILWKAOT SEMARANG 2015**

A. Analisa Latar Belakang Keterlibatan PAC GP Ansor Pedurungan Pilwakot Semarang 2015	65
B. Analisa Faktor yang Mendorong Keterlibatan PAC GP Ansor Pedurungan Pilwakot Semarang 2015	71

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran-Saran	75
C. Penutup	76

**DAFTAR PUSTAKA
RIWAYAT HIDUP**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor)¹ merupakan salah satu Badan Otonom Nahdlatul Ulama yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kepemudaan.² Pola penyelenggaraan organisasinya, GP Ansor harus merujuk pada garis kebijakan Nahdlatul Ulama. Sehingga pengurus NU pada tingkatnya masing-masing berhak mengadakan perubahan terhadap pelaksanaan organisasi yang bertentangan dengan garis kebijakan Nahdlatul Ulama. Hal ini harus dipahami oleh semua komponen pelaksana organisasi gerakan pemuda Ansor, sehingga dapat diantisipasi dan dihindari ketimpangan dan ketidakselarasan antara perjalanan organisasi GP Ansor dengan Nahdlatul Ulama.³

kebijakan NU salah satunya kembali ke Khittah 1926 atau kembalinya eksistensi Nahdlatul Ulama dari organisasi politik kedalam bentuk asal, yakni organisasi kemasyarakatan sosial (ormas) keAgamaan. Dengan kata lain, Nahdlatul Ulama menghentikan segala aktivitas yang berkaitan dengan politik (praktis), dan kembali menggalakan kegiatan

¹ Istilah Ansor yang berarti penolong, merupakan hasil dari sebuah tanggapan usulan nama PNU dari kyai Wahab dalam perubahan nama Ansor, dari situlah nama ANO diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Berarti pula, ANO dapat mengambil berkah (*tabarrukan*) serta teladan terhadap sikap, perilaku, dan semangat perjuangan para sahabat yang mendapatkan predikat Ansor tersebut. Choirul Anam, *Gerak Langkah Pemuda Ansor seputar sejarah Kelahiran*, Jakarta: PT Duta Aksara Mulia, cetakan kedua, 2010, hlm. 26

² Panduan Administrasi dan Materi Pendidikan & Latihan, keputusan kombes XIV GP ansor. Jakarta, 2002, hlm 92.

³ *Ibid*

dibidang sosial, pendidikan dan dakwah.⁴ Kebijakan ini nampak setelah terjadinya penyingkiran orang-orang Nahdlatul Ulama di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tekanan pemerintah terhadap ormas dan partai politik, dan munculnya generasi muda NU yang mulai bersentuhan dengan teori-teori sosial kritis, diawali oleh Gus Dur dan kawan-kawan, ditandai dengan polarisasi antara kubu Cipete dan Situbondo.⁵

Kelompok situbondo dan kelompok cipate lahir setelah munculnya insiden 2 Mei 1982 tentang pengunduran diri KH. Idham Kholid yang dicabut kembali tanggal 14 Mei 1982. Insiden ini menimbulkan polarisasi dua kelompok: *pertama*, kelompok yang dipimpin oleh empat Ulama senior yaitu KH. As'ad Syamsul Arifin, KH. Ali Ma'shum, KH. Masjkur, dan KH. Mahrus Ali; dan kelompok cipete dibawah otoritas KH. Idham Kholid yang banyak terdiri dari para politisi dan birokrat NU di Jakarta.⁶

Melihat kondisi yang kurang menguntungkan ini, maka NU mengambil keputusan tegas ''Kembali ke Khittah 1926'' dan tidak lagi aktif digelanggang politik praktis serta menjaga jarak yang sama dengan ketiga kekuasaan sosial politik yang ada. Kebijakan yang sangat strategis ini hasil dari keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo pada 1984,⁷ yang sebelumnya diusulkan dan direkomendasikan oleh Munas Alim Ulama bertempat di PP Salafi'iyah Sukorejo Situbondo tanggal 13-16 Rabi' Awal 1404 H/ 18-21 Desember 1983 M. Dalam Munas ini, ada tiga

⁴ Lihat Choirul Anam, *op.cit.*, hlm. 343

⁵ Nur Kholik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013, hlm 262

⁶ *Ibid*

⁷ Asmawi, *PKB Jendela Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999, hlm 18

komisi yang dibuat, yaitu: Komisi I mengenai *Masa'il Diniyah*, Komisi II mengenai Pemulihan Khittah NU 1926, dan Komisi III mengenai *al-Syu'un Ijtima'iyah*.⁸

Dalam menyikapi Mukhtamar NU, GP Ansor juga akan menegakkan nilai-nilai luhur NU. Ansor meyakini kearifan para ulama untuk merumuskan suatu khittah yang dapat dijadikan petunjuk dalam mengaktualisasi hakikat NU sebagai organisasi sosial-keagamaan.⁹

GP Ansor juga diamanatkan dalam Konbes ke-8 (1984), akan menjaga jarak dengan tiga kekuatan politik yang ada pada saat itu (PPP, Golkar dan PDI), demi menjaga netralitas sebagaimana digariskan para Ulama NU.¹⁰

Kebijakan terus dilakukan oleh ketua umum GP Ansor Slamet Effendy Yusuf periode 1985-1989, kebijakan ini terlihat dalam konbes Ciawi, april 1988 yang melahirkan Catur Khidmat, yang antara lain berupa ikrar untuk membela, menegakkan dan mengamalkan pancasila dan Khittah NU 1926.¹¹ misi terus berlanjut dalam kepemimpinan Nusron Wahid (2011-2016). Terkait dengan politik, Nusron menjanjikan akan mengubah citra Ansor agar tidak dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda politik (OKP Politik), kader Ansor ketika akan

⁸ Nur Khalik Ridwan, *op.cit* hlm 263

⁹ Lihat *Kompas*, 2 Desember 1984

¹⁰ Erwien Kusuma, *yang muda yang berkiprah, Gerakan pemuda Ansor dan politik Indonesia masa demokrasi lebral hingga masa reformasi (1950-2010)*, Bogor: kekal Press, 2012 hlm 157

¹¹ Choirul Anam, *op.cit*, hlm 156

berpolitik hendaknya melepas atribut Ansor, dan tidak akan membawa Ansor ke politik praktis.¹²

Sebagai warga Nahdlatul Ulama yang baik, komitmen Khittah NU harus dipegang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dalam kaidah yang sangat masyhur dikalangan Warga NU;

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجدى الأصح

“Tetap melestarikan kaidah lama yang baik dan mengambil kaidah baru yang lebih baik”

Warga NU tidak boleh rebutan jabatan politik apalagi untuk kepentingan sesaat. Silahkan masuk di panggung politik dengan gerbong partai apapun dengan tidak membawa nama NU. Tetapi secara moral mereka harus tetap menunjukkan jati dirinya sebagai orang NU, mempunyai arti terhadap organisasi NU dan tetap menjaga nama baik organisasi.¹³

Namun dalam Pemelihan Kepala Daerah Tahun 2015 di Kota Semarang, cita-cita untuk mewujudkan Khittah NU telah dilanggar oleh PAC Gerakan Pemuda Ansor Pedurungan. Kegiatan politik praktis ini nampak jelas ketika Pimpinan Cabang kota Semarang M. Busro menyampaikan bahwa GP Ansor dan Banser siap memenangkan pasangan Hendi dan Ita dalam pilwalkot 2015.¹⁴ Bersamaan dengan waktu yang sama dukungan untuk kemenangan calon walikota juga dilakukan oleh Komandan tenaga inti Gerakan Pemuda Ansor yaitu Barisan Ansor

¹² Erwien, *op.cit* hlm 227

¹³ Amin Farih, Junaedi, *Buku Pelajaran ke-NU-an dan Tentang Ahlussunah Waljamaah (ASWAJA)*, Semarang: LP Maarif NU Jawa Tengah, Cet ke-3, 2014, hlm 31

¹⁴ Rici Ftriyanto, *GP Ansor dan Banser dukung Hendi-Ita*, Jawa Pos Radar Semarang, 4 Desember 2015

Serbaguna (BANSER) kota Semarang. Dukungan dinyatakan dalam kegiatan apel pagi kebangsaan dalam rangka memperingati hari santri dan hari sumpah pemuda, kegiatan tersebut dihadiri ketua PAC GP Ansor Pedurungan dan Calon walikota Semarang Nomer urut 1 (Soemarmo) beliau sekaligus menjadi Inspektur dalam upacara apel kebangsaan.¹⁵

Apa sebenarnya yang mengakibatkan Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Pedurungan kota Semarang dan Banser untuk berpolitik praktis? pertanyaan tersebut layak diajukan untuk menggambarkan idealitas dan realitas yang ada.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam skripsi dengan judul **FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG KETERLIBATAN PIMPINAN ANAK CABANG GERAKAN PEMUDA ANSOR PEDURUNGAN DALAM PILWALKOT SEMARANG 2015**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Mengapa Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor pedurungan sebagai Banom Nahdlatul Ulama terlibat dalam pemilihan walikota Kota Semarang 2015 ?

¹⁵ Rizal Kurniawan, *GP Ansor dan Banser Mendukung MaZu*, Jawa Pos Radar Semarang, 2 Novemeber 2015

2. Faktor-faktor apa yang mendorong keterlibatan Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Pedurungan dalam pemilihan walikota Kota Semarang 2015?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui latar belakang keterlibatan Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Pedurungan dalam pemilihan walikota Semarang 2015
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong keterlibatan PAC gerakan pemuda Ansor Pedurungan dalam Pilwakot tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang politik, yang mampu memperkaya khazanah, serta khususnya yang membahas mengenai politik organisasi masyarakat.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap Ansor NU, khususnya PAC Gerakan Pemuda Ansor Pedurungan kota Semarang. Hasil penelitian tersebut juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

E. Telaah Pustaka

Pada bagian ini peneliti akan meninjau karya-karya terdahulu yang mengkaji masalah yang berhubungan dengan tema yang penulis ambil. *Pertama*, hasil Skripsi karya Choirul Anam yang berjudul *gerak langkah pemuda Ansor: seputar sejarah kelahiran* yang diterbitkan Duta Aksara Mulia, Jakarta, tahun 2010. Buku ini lebih memfokuskan pada kajian sejarah kelahiran dan gerak langkah pemuda Ansor. Dalam buku ini juga dipaparkan tentang sejarah konfigurasi perpolitikan praktis GP Ansor terhadap kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 1967 sampai 1985, seperti penolakan kembalinya kekuasaan orde lama dalam segala bentuk.

Kedua, skripsi karya Erwin Kusuma, dengan judul *Yang Muda Yang Berkiprah, Gerakan Pemuda Ansor Dan Politik Indonesia Masa Demokrasi Liberal Hingga Masa Reformasi* yang diterbitkan Kekal Press, Bogor 2012. Dalam buku ini Erwin memaparkan kanvas perpolitikan GP Ansor dari masa Demokrasi Parlementer hingga Demokrasi Reformasi. Temuan buku ini hanya menggambarkan perpolitikan praktis GP Ansor tahun 1950 sampai 2010, tidak ada keterlibatan GP Ansor dalam Pilkada.

Ketiga, penelitian skripsi karya Choirul Anam, dengan judul *pertumbuhan dan Perkembangan NU* yang diterbitkan oleh Duta Akasara Mulia Surabaya 2010. Dalam buku ini Anam menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan NU dimulai dari munculnya NU, menjadinya partai politik dan adanya keterlibatan GP Ansor dalam kanvas politik.

Keempat, karya penelitian Individu Hamdani dengan judul *Perilaku Politik Kiai Kaliwungu* yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang 2012. Dalam karya penelitian ini Hamdani menggambarkan tentang perilaku kiai dalam Pilkada Kabupaten Kendal, dan pemikiran politik kiai kaliwungu dalam hal ini KH. Dimiyati Rois dan KH. Khafidin Ahmadum.

Dari hasil studi maupun research yang telah dilakukan oleh para penulis diatas, belum ada satupun yang membahas maupun meneliti tentang tema faktor- faktor yang mendorong keterlibatan pimpinan anak cabang gerakan pemuda ansoor pedurungan dalam pilwalkot semarang 2015.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sudut pandang (*stand point*) penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan latar dan individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan; subjek penyelidikan, baik berupa organisasi ataupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisahkan atau menjadi hipotesis, tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu

keseluruhan.¹⁶ Sedangkan menurut patton, metode kualitatif adalah untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah (*natural*) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah.¹⁷ oleh karena itu metode ini sangat tepat untuk menemukan apa yang terjadi dan kemudian untuk membuktikan apa yang telah ditemukan.

2. Sumber dan Jenis Data

- a. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari pengurus PC GP Ansor kota Semarang dan Pimpinan Anak Cabang Pedurungan.
- b. Data sekunder yakni data yang mendukung atau data tambahan bagi data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yang tidak didapatkan secara langsung melainkan perantara berupa data dan informasi yang terdapat didalam buku-buku, jurnal penelitian, hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan keterlibatan GP Ansor dalam Pilwalkot semarang 2015.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan Informasi pada penelitian ada tiga cara yang akan digunakan yaitu:

- a. observasi partisipasi, dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan orang yang sedang diamati. Sambil melakukan pengamatan, penelitian ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi

¹⁶ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-ruzza Media, 2014, hlm 15

¹⁷ *Ibid*, hlm 15

partisipasi ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.¹⁸

- b. Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*), dengan wawancara ini bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara hanya digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.¹⁹ Alat ini akan digunakan untuk mewancarai pengurus PC GP Ansor kota Semarang, pengurus PAC GP Ansor Pedurungan dan pengurus PCNU kota Semarang.
- c. Dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁰

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode diskriptif yaitu menguraikan masalah yang sedang dibahas secara teratur mengenai seluruh konsepsi masalah yang bersangkutan. Metode ini digunakan sebagai pendekatan untuk menguraikan dan melukiskan masalah sebagaimana adanya agar mendapatkan gambaran yang terkandung dalam masalah tersebut dan untuk menjelaskan suatu fakta (pemikiran) yaitu

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D*, Bandung: ALFABETA, 2014, hlm 227

¹⁹ *Ibid*, hlm 233

²⁰ *Ibid*, hlm 240

benar atau salah. Oleh karena itu pada tahap ini lebih daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya.²¹

Selain itu, peneliti juga akan menggunakan metode Fenomenologi, yakni sebuah model pendekatan yang dikembangkan oleh Edmund Husserl. Metode ini menegaskan bahwa manusia hanya mengenal penampakan realitas kepada kesadaran (*fenomenon*) dan bukan wujud dari realitas itu sendiri (*nomenon*) tetapi lebih dimaksudkan kepada sesuatu pengertian yang sama sekali baru.²² Fenomena adalah realitas sendiri yang tampak. Tidak ada selubung atau tirai yang memisahkan manusia dengan realitas. Realitas itu sendiri tampak bagi manusia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan skripsi, peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika penulisan.

Bab II: Pada bab ini memaparkan landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi, yang terdiri dari : NU dan Politik Praktis, serta Khittah NU, Tipologi Kepemimpinan Dalam Tradisi Islam, Badan Otonom NU.

21 Saiful Anwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 1997, hlm, 91.

22 Lukman S. Thahir, *Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi Dan Sejarah*, Yogyakarta:Qirtas:2004, hlm. 63.

Bab III: pada bagian bab ini berisi tentang keterlibatan Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Pedurungan dalam Pemilihan walikota Kota Semarang 2015

Bab IV: dalam bab ini penulis akan menganalisa terhadap keterlibatan PAC GP Ansor Pedurungan dalam Pilwalkot dilihat dari; latar belakang keterliabatan PAC Ansor dalam pilwakot dan faktor-faktor yang menndorong keterlibatan dalam pilwakot Semarang 2015.

Bab V: penutup. Bab ini berisikan simpulan , saran, dan penutup. Bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka , lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

NU POLITIK PRAKTIS, KHITTAH NU, TIPOLOGI KEPEMIMPINAN, DAN BADAN OTONOM NU

A. NU dan Politik Praktis

Nahdatul Ulama merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Di samping melingkupi kegiatan keagamaan, gerak langkah organisasi ini juga merambah signifikan dalam memajukan bidang pendidikan di tanah air, khususnya melalui keberadaan pondok-pondok pesantren. Nahdaltul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 16 Rajab 1344 (13 Januari 1926) di Surabaya dengan pemeriksa utama KH. Hasyim Asy'ari serta KH Abdul Wahab Chasbullah. Adapun KH Hasyim Asy'ari kemudian dipilih sebagai Rais Akbar.¹

Pembentukan NU pada awalnya dilatarbelakangi keinginan Raja Abdul Aziz Ibnu Saud untuk menerapkan asas tunggal, yakni madzhab wahabi di Mekah, serta menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah. Gagasan tersebut disambut hangat kaum modernis di Indonesia. Sebaliknya kalangan pesantren menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.²

¹ Abdul Mun'im Al-Hafni, *Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Madzhab, Partai, dan Gerakan Islam seluruh Dunia*, Jakarta:Grafindo Khazanah Ilmu. 2009. Hlm. 649.

² *Ibid.* Hlm. 650.

Akibat perbedaan sikap itu, kalangan pesantren memutuskan keluar dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925 yang akan berangkat ke Mekah menghadiri undangan Raja Ibnu Saud. Mereka akhirnya membentuk Komite Hijaz. Rapat pertama Komite Hijaz diadakan tanggal 31 Januari 1926, bertempat di kediaman KH Abdul Wahab di desa kertopaten, Surabaya. Dua keputusan penting dihasilkan. Pertama, kalangan pesantren membuat delegasi sendiri yang diketahui KH Wahab Chasbullah ke Mekah bertemu langsung Raja Ibnu Saud.³

Kedua, membentuk satu jami'ah sebagai wadah persatuan ulama. KH Alwi Abdul Aziz mengusulkan nama jami'ah Nahdlatul Ulama yang kemudian disepakati. Organisasi ini berakidah Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jama'ah, serta menganut empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali), dan berazaskan Pancasila. Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi, pada perkembangannya KH Hasyim Asy'ari lantas merumuskan kitab *Qonun Asasi* (prinsip dasar), dan kitab *I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah*. Kedua kitab tersebut akhirnya diejawantahkan dalam khittah NU. Inilah yang hingga kini menjadi dasar dan pedoman warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam berbagai bidang.⁴

Disamping itu, berdirinya Nahdlatul Ulama juga memberlakukan ajaran Islam yang menganut faham Ahlussunah wal Jama'ah untuk

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.⁵ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka NU melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya ajaran islam yang menganut faham Ahlulsunnah wal Jama'ah.
- b. Di bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan mengupayakan terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang taqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.
- c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (*mustadl'afin*).
- d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merarta.
- e. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Kahiru Ummah.⁶

⁵ Lihat AD-ART NU 2015. (pasal 8 ayat 2)

⁶ *Ibid*

Namun dalam perkembangan selanjutnya Nahdlatul Ulama mencoba untuk berpolitik. Meskipun sejak awal berdirinya Nahdlatul Ulama bukan merupakan organisasi politik, namun dimensi politis dalam setiap aktivitas gerakannya tidak dapat dihindarkan. Keterlibatan Nahdaltul Ulama secara organisatoris dalam kancah politik praktis dilakukan sejak tahun 1952 sampai 1971 (Sembilan belas tahun).⁷

Terselenggaranya Kongres umat Islam di Yogyakarta (7-8 November 1945) memutuskan pembentukan sebuah partai politik dengan nama Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) dan merupakan salah satu-satunya partai poltik yang dimiliki oleh umat islam, tidak ada partai poltik islam lain.⁸ Semenjak masyumi ini lahir, NU bersama Muhamadiyah dan Organisasi keagamaan lainnya menjadi anggota istimewa dengan mengirimkan wakil-wakilnya untuk berjuang diarena politik melalui partai Masyumi. Ini mudah dimengerti, karena NU juga ikut menanam modal dalam pembentukan Masyumi di zaman jepang. Bahkan, boileh dikatan saham NU paling besar dalam membujuk jepang demi berdirinya Masyumi. Karena itu posisi penting di Majelis Syura, selalu berada ditangan NU.⁹

Perkembangan politik tidak selamanya sesuai dengan perhitungan diatas kertas. Konflik internalpun terjadi dalam partai Masyumi. Sikap dan watak politik NU memang berbeda dengan sikap dan watak politik

⁷ Choirul Anam, *op.cit.*, hlm 251

⁸ Roziki Daman, *Membidik NU Dalam Percaturan pasca Khittah*, yogyakarta: Gema Media, 2001, hlm 94.

⁹ Choirul Anam, *op.cit.*, hlm 252

kelompok intelektual di Masyumi dan perbedaan itu bermula dari perbedaan pandangan terhadap suatu bentuk Negara dan strategi politik.¹⁰ Semisal, Majelis Syura pada awalnya mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan partai, perkembangan berikutnya justru berubah hanya sebagai Dewan Penasehat yang tidak pernah diberi kesempatan untuk menyampaikan nasehat-nasehatnya.¹¹ dan ketidakpuasan NU terhadap Masyumi karena para tokohnya selalu dipingpong dan dijadikan bulan-bulanan oleh politik non-NU.

Melihat konflik internal ini dinilai oleh NU sudah terlalu memuncak dan tidak bisa ditolerir, maka Nahdlatul Ulama membuat sebuah keputusan yang sangat mendasar, yakni keluar dari Masyumi dan membuat partai NU. Keputusan ini diambil dalam sebuah Konferensi NU se- Jawa dan Madura di Jombang (1952). Keputusan konferensi tersebut dibahas kembali dalam Muktamar NU di Palembang 28 April- 1 Mei 1952. Dan Akhirnya Muktamar mengukuhkan keputusan konferensi Jombang.¹² Dengan demikian, NU sudah membuka lembaran sejarah baru. Jika semula ia hanya menitik beratkan orientasi kepada soal-soal sosial dan keagamaan. Maka, semenjak Mukatamar Palembang NU menambahkan orientasi kepada masalah politik. AD-ART pun sudah tidak

¹⁰ *Ibid.* hlm 263

¹¹ *Ibid.* hlm 264

¹² Asmawi, *Op.Cit.* hlm. 14

bernama Jam'iyah lagi, tetapi sudah diubah menjadi AD-ART Partai Politik NU.¹³

Semenjak NU disyahkan menjadi partai politik, maka keberadaan NU sudah bukan lagi murni sebagai organisasi sosial keagamaan. Pada pemilu pertama tahun 1955 partai NU mampu berkompetesi dengan partai lain dan berhasil menempati peringkat tiga besar dengan perolehan kursi 45 di parlemen. Jumlah perolehan kursi ini merupakan prestasi cemerlang bagi NU dalam akses politik yang belum pernah dimiliki NU semasa bersama Masyumi.¹⁴

Masa kejayaan politik NU tidak bertahan lama, karena pada pemilu 1971 tidak mampu menandingi perolehan suara Golkar. Konfigurasi politik mengalami perubahan mendasar di bawah kekuasaan pemerintahan Orde Baru ini. Meski perolehan kursi NU bertambah menjadi 58 kursi pada pemilu 1971, tapi dengan kekuatan suara Golkar menjadi posisi NU tetap dalam kondisi sulit.¹⁵

Pemerintah orde baru dibawah kekuasaan presiden Soeharto tidak menghendaki banyak partai dalam percaturan politik di Indonesia, maka dibuat kebijaksanaan baru dengan menyederhanakan jumlah partai dari sepuluh partai menjadi tiga partai (Golkar dan dua parpol PPP dan PDI).

¹³ Choirul Anam. *Ibid* .hlm 266

¹⁴ Khoirul Ummatin, *perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: 2002. Hlm. 55

¹⁵ *Ibid*.

Pola yang diambil dalam penyederhanaan partai adalah dikelompokkan berdasarkan kelompok keagamaan, Nasionalis, dan Kekaryaan.¹⁶

Melalui proses yang tidak gampang, *Partai Persatuan Pembangunan* (PPP) akhirnya dipilih menjadi nama dari “fusi” 4 (empat) partai Islam yang dalam pemilu 1971 masih memakai lambang sendiri-sendiri. Mungkin bisa dicatat, bahwa pada tanggal 30 Dzulhijjah 1392 H atau tanggal 5 Januari 1973, melalui sebuah “*Deklarasi Penggabungan*”, terbesit satu harapan memunculkan kesatuan langkah Ummat Islam dalam membawakan aspirasi politiknya.¹⁷

Dalam melahirkan PPP, tampaknya NU memainkan peranan cukup besar. Peranan NU tampak pada pemberian lambang partai dengan gambaran “ka’bah” bersal dari KH. Bishri Syansuri. Dalam struktur organisasi terlihat pada penempatan lembaga muktamar sebagai forum tertinggi partai. Dalam struktur kepemimpinan penempatan majelis syura sebagai pemimpin tertinggi partai yang dipimpin Rais ‘Aam. Dan pada personalia, antara lain, KH. Bishri Syansuri sebagai Rais ‘Aam, KH. M. Dcahlan sebagai wakilnya, KH. Masykur sebagai ketua Umum Majelis pertimbangan, sedangkan KH. Idham Chalid sebagai presiden partai.¹⁸

Kehidupan kepartaian di Indonesia tidak berjalan mulus, konflik internal selalu saja terjadi. Saat PPP dipimpin DR. J Naro (1978) yang

¹⁶ *Ibid.* hlm. 16

¹⁷ Salamet effendy Yusuf, Mohammad Ichwan sjam dan Masdar Mas’udi, *Dinamika Kaum Santri Menelusuri jejak dan pergolakan Internal NU*, Jakarta: Rajawali, 1983, hlm 57.

¹⁸ *Ibid*

menggantikan Mintaredja SH, terjadi kisruh soal daftar calon sementara yang tidak melibatkan unsur NU.¹⁹ Pada tanggal 27 Oktober 1981 pagi hari Ketua Umum DPP-PPP Dr. H. Naro (dari unsur MI) dengan didampingi oleh rekan-rekannya seunsur pimpinan MI seperti Ali Tamin, A. Malik dan Ismail Hasan Metareum- berhasil menyampaikan urutan daftar calon sementara keanggotaan DPR di kediaman Mendagri Amirmachmud. Pada tanggal yang sama, sinag harinya, sejumlah tokoh PPP yang lain seperti H.M. Jusuf Hasjim, H. Djadil Abdillah (salah seorang ketua MI) dan Drs. M. Zamroni datang kekantor Lembaga Pemilihan Umum (LPU) untuk menyerahkan daftar calon juga. Akan tetapi daftar calon yang diserahkan di kantor LPU ini tidak ada yang menerima.²⁰

Ketika daftar Calon itu kemudian diumumkan, ternyata memang daftar yang disusun oleh Naro dan kawan-kawanlah yang muncul. Beberapa tokoh utama NU seperti Drs. H. Rachmat Muljomiseno (eks Menteri Perdagangan), Prof. KH. Saifuddin Zuhri (eks Menteri Agama), KH. Masjkur (Wakil Ketua DPR), H. Aminuddin Azis (eks Duta Besar), H.M. Jusuf Hasjim, Drs. H.A Chalik Ali, Dr. T. Jafizham dan masih banyak lagi, terpental keurutan nomor yang hampir dapat dipastikan “tidak jadi”. Sementara sejumlah “tokoh NU” yang sebenarnya yang tidak dicalonkan oleh NU atau tidak merupakan calon utama justru muncul dalam urutan

¹⁹ Nur Kholik Ridawan, *Partai NU di PPP DAN Pemilu 1982, NU dan Bangsa 1914-2010*, Jogjakarta: Ar-Ruzz media, 2013, hlm 258

²⁰ Slamet Effendy Yusuf, *Op.Cit.* hlm 71.

“calon jadi” bukan hanya itu, jumlah wakiol NU yang diperkirakan akan jadi juga berkurang, sebagaimana direncanakan oleh unsur MI.²¹

Kemudian PBNU dalam suratnya kepada Lembaga Pemilihan Umum (LPU) pada 6 November 1981 perihal daftar calon PPP untuk DPR RI. Surat ini menyatakan bahwa PBNU memandang daftar caleg yang disampaikan J. Naro kepada LPU tanpa dimusyawarahkan kepada NU, maka PBNU menyatakan tidak dapat menerimanya. Dijelaskan pula bahwa masalah perimbangan dalam rangking utama dalam daftar itu, Naro telah merombak secara dratis nama-nama calon NU yang telah disusun ke nomor-nomor yang tidak signifikan.²²

Pada periode inilah NU dicubik-cubik, dipinggirkan dan diminimalisasi peranannya di dalam partai PPP. Melihat kondisi yang kurang menguntungkan ini, ditambah terus berlanjutnya konflik internal terutama antara MI dan NU. NU akhirnya mengambil sebuah keputusan tegas “kembali ke Khittah 1926” dan tidak lagi aktif digelanggang politik praktis. Serta ,menjaga jarak yang sama dengan ketiga poltik kekuatan sosial politik yang ada.²³ Keputusan ini diambil dalam Mukhtamar NU ke-27 tahun 1984 bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo asuhan KH. R. As’ad Syamsul Arifin, murid KH. Hasyim Asy’ari yang karismatis. Mukhtamar ini dianggap mukhtamar yang bersejarah karena di mukatamar inilah NU kembalikan kepada Khittah

²¹ *Ibid*

²² Nur Kholik Ridwan, *Op.Cit.* hlm 258

²³ Asmawi, *Op.Cit* .hlm 18

sebagai gerakan *diniyah ijtima'iyah*. Mukhtamar diselenggarakan mulai 8 hingga 12 Desember 1984.²⁴

Greg Fealy, Greg Barton menyebutkan dari beberapa keputusan yang diambil dalam Mukhtamar, di antara yang terpenting adalah:

1. Penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar NU.
2. Pemulihan keutamaan kepemimpinan ulama dengan menegaskan supermasi Syariah atas Tanfidziyah dalam setatus dan hukum.
3. Penarikan diri dari 'politik praktis' dengan cara me-larang pengurus NU secara bersamaan memegang kepengurusan di dalam partai politik; dan
4. Pemilihan pengurus baru dengan usulan program baru yang lebih menekankan pada bidang-bidang non-politik.²⁵

B. Pengertian Khittah NU 1926

Sesuai dengan hasil keputusan Mukhtamar NU ke-27 No.02/ MNU-27/1984 di Situbondo, Khittah NU 1926 dapat diartikan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian Khittah NU

- a. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdaltul Ulama yang harus dicerminkan dalam

²⁴ Nur Kholik Ridwan, op. cit. hlm 268

²⁵ Greg Barton dan Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: 1997, hlm 85.

tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.

- b. Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlussunah wal Jamaah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
- c. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.²⁶

2. Dasar-Dasar Faham Keagamaan Nahdaltul Ulama

- a. Nahdlatu Ulama mendasarkan faham mendasar keagamaannya kepada sumber ajaran islam: Al-Qur'an, As- Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas.
- b. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya tersebut diatas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlussunnah wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan (al- madzhab):
 - 1) Di bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlussunah wal Jama'ah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al- Asy'ary dan Imam Abu Manshur Al- Maturudi.
 - 2) Di bidang fiqh, Nahdaltul Ulama mengikuti jalan pendekatan (al-madzhab) salah satu dari madzhab Abu Hanifah An Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.

²⁶ PBNU, *hasil Mukatamar NU ke-27 Situbondo, Nahdlatul Ulama kembali ke khittah perjuangan 1926*, Jakarta; 1986, hlm.100.

- 3) Di bidang tashawwuf mengikuti antara lain Imam Al Junaid Al Bugdadi dan Imam Al- Ghazali serta imam-imam yang lain.
- c. Nahdaltul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fithri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Fahaman keagamaan yang dianut oleh Nahdaltul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.²⁷

3. Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama

Dasar-dasar pendirian fahaman keagamaan Nahdaltul Ulama tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan kepada:

a. Sikap *tawasuth dan i'tidal*

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdaltul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrim)

²⁷ *Ibid*, hlm. 101.

b. Sikap *tasamuh*

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat *furu'* atau yang menjadi masalah khilafiyah; serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

c. Sikap *tawazun*

Sikap seimbang dalam berkhidamah. Menyerasikan khidmah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khidamh kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

d. *Amar ma'ruf nahi munkar*

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

4. Perilaku Yang Dibentuk Oleh Dasar Keagamaan Dan Sikap Kemasyarakatan Nahdaltul Ulama.

Dasar-dasar keagamaan (angka 3) dan sikap kemasyaraktan tersebut (angka 4) membentuk perilaku warga Nahdlatul Ulama, baik dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi yang:

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam.
- b. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
- c. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah dan berjuang.
- d. Menjunjung tinggi persaudaraan (al-ukhuwwah), persatuan (al-ittihad) serta kasih mengasihi.
- e. Meluhurkan kemuliaan moral (al-akhlak al-karimah), dan menjunjung tinggi kejujuran (ash-shidqu) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
- f. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada agama, bangsa dan negara.
- g. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
- h. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya.
- i. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia.
- j. Menjunjung tinggi kepelopran dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.
- k. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Ikhtiar-Ikhtiar yang Dilakukan Nahdaltul Ulama

Sejak berdirinya, Nahdaltul Ulama memilih beberapa bidang utama kegiatannya sebagai ikhtiar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Ikhtiar-ikhtiar tersebut adalah:

a. *Peningkatan silaturahmi/komunikasi/ inter-relasi antar Ulama.*

(dalam statutoen Nahdaltoel Oelama 1926 disebutkan: mengadakan perhoeboengan di antara oelama-oelama jang bermadzhab)

b. *Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/pengkajian/ pendidikan.*

(dalam statutoen Nahdlatoel Oelama 1926 disebutkan: memeriksa kitab-kitab sebeloemnya dipakai oentoek mengadjar, soepaja diketahoei apakah itoe daripada kitab-kitab ahli soennah wal djamaah ataoe kitab-kitab ahli bid'ah; memperbanjak madrasah-madrasah jang berdasarkan agama Isalam).

c. *Peningkatan kegiatan penyiaran Islam, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan pelayanan sosial.*

(dalam statooten Nahdlatoel oelama 1926 diseboetkan: menjiarkan agama Isalm dengan apa sadja jang halal; memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masjid-masjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe djuga dengan hal ihwalnja anak-anak jatim dan oarang-oarang jang fakir miskin)

d. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah.

(dalam statooten Nahdlatoel Oelama 1926 diseboetkan: mendirikan badan-bdan oentoek memadjoekan oeroesan pertanian, perniagaan dan peroesahaan jang tiada di larang oleh Sjara' agama Isalam).

Kegiatan-kegiatan yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama pada awal berdiri dan khidmahnya menunjukkan pandangan dasar yang peka terhadap pentingnya terus-menerus dibina hubungan dan komunikasi antara para Ulama sebagai pemimpin masyarakat; serta adanya keprihatinan atas nasib manusia yang terjerat oleh keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan. Sejak semula Nahdlatul Ulama melihat masalah ini sebagai bidang garapan yang harus dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan nyata.

Pilihan akan ikhtiar yang dilakukan mendsari kegiatan Nahdaltul Ulama dari masa ke masa dengan tujuan untuk melakukan

perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri.

Nahdaltul Ulama sejak semula meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para Ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, da'wah Islamiyah, kegiatan sosial serta perekonomian adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk merubah masyarakat yang terbelakang, bodoh dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia.

Pilihan kegiatan Nahdaltul Ulama tersebut sekaligus menumbuhkan sikap partisipatif terhadap setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang maslahat.

Setiap kegiatan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan manusia dipandang sebagai perwujudan amal ibadah yang didasarkan pada faham keagamaan yang dianutnya.

6. Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan Ulama Di Dalamnya

Dalam rangka melaksanakan ikhtiar-ikhtiarnya Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah yang membawa faham keagamsn, maka Ulama sebagai

matarantai pembawa faham Islam ahlusunah wal jamaah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawasan, dan pembimbingan utama jalannya organisasi.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, Nahdlatul Ulama menempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya untuk menanganinya.

7. Nahdlatul Ulama dan Kehidupan Berbangsa

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadikan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatakan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi yang aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945 dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warganegara yang senantiasa menjunjung-tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (al-ukhuwwah), toleransi (at-tasamuh), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama warganegara yang mempunyai keyakinan atau agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan, Nahdlatul Ulama senantiasa berusaha sadar untuk menciptakan warganegara yang menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara.

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah secara organisasi tidak terkait dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga.

Setiap warga Nahdlatul Ulama adalah warganegara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh Undang-undang. Di dalam hal warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak-hak politiknya harus dilakukan secara bertanggungjawab, sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum dan mampu mengembangkan mekanisme musyawarah dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.

8. Khittah

Nahdlatul Ulama ini merupakan landasan dan patokan-patokan dasar yang perwujudannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala - terutama tergantung kepada semangat pemimpin warga Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama hanya akan memperoleh dan mencapai cita-cita jika pemimpin dan warganya benar-benar meresapi dan mengamalkan Khittah Nahdlatul Ulama ini.²⁸

Adapun menurut Ahmad Sidiq dalam pandangan dan pemikirannya tentang Ulama dan Pancasila sebagai berikut :

1. Politik, merupakan hak asasi setiap warga negara termasuk warga Nahliyin. Akan tetapi NU bukan suatau wadah kegiatan politik.
2. Oleh karena itu NU menghargai setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Berdasarkan hal itu, maka NU memberikan kebebasan warganya untuk masuk atau tidak masuk satu organisasi politik dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui organisasi tersebut selama hal itu bermanfaat bagi perjuangan Islam.
3. Pancasila merupakan dasar negara sebagai hasil konsesus Nasional yang diupayakan oleh umat Islam melaluu pemimpinnya. Oleh karena itu umat Islam mempunyai kewajiban memenuhi nila-nilai pancasila sesuai dengan

²⁸ PBNU, *Op.Cit*, hlm 101-107

pemahaman menurut bunyi dan makna yang terkandung dalam undang-undang dasar 1945.

4. Menerima NU terhadap Pancasila bukan sekedar taktik, akan tetapi merupakan suatu prinsip.
5. Nilai-nilai luhur yang dirumuskan dalam dasar negara atau pancasila dapat disepakati dan dibenarkan menurut pandangan Islam, oleh karena itu umat Islam ikut aktif merumuskan pancasila tersebut.
6. Pancasila sebagai dasar negara sejalan dengan agama Islam dan tidak bertentangan. Oleh karena itu keduanya tidak harus dipilih dengan menafikan (meniadakan) yang lain.
7. Menurut pandangan NU, Indonesia dalam arti budaya (bukan secara politis) adalah wilayah Islam, pandangan itu didasarkan pada kenyataan bahwa orang yang secara tidak terus terang menyatakan agamanya dianggap sebagai orang Islam, disamping itu perjuangan kemerdekaan bagi umat Islam (NU) hukumnya fardu ain, sehingga negara Indonesia sah menurut hukum Islam.
8. Sila pertama pancasila yang menjiwai sila lainnya merupakan cermin rumusan tauhid yang merupakan inti akidah Islam menurut pengertian keimanan dalam Islam. Oleh karena itu pengalaman pancasila merupakan wujud dari usaha umat Islam merealisasikan syariat Islam.

9. Sesuai dengan sejarah kelahirannya, NU merupakan gerakan para Ulama yang tercermin dalam nam Nahdlatul Ulama. Moleh karena itu kepemimpinan dalam NU adalah kepemimpinan ulama dalam lembaga pengurus Syuriah.
10. Paham keagamaan NU menyatakan bahwa sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sesuai dengan paham Ahlussunah wal Jamaah yang dipahami dengan mengikuti pendapat ulama madzahibul arba'ah.
11. Kembali kepada khittah 1926 berarti meletakkan ulama Syuriah sebagai pemimpin, pengelola, pengendali dan pembimbing pemikiran dan ide Islam.
12. Khittah 1926 merupakan pedoman pemikiran warga dan pengerak NU.

Pemikiran kyai Ahmad Sidiq merupakan gambaran bahwa lembaga Syuriah merupakan lembaga yang mentapkan pola kebijakan NU dalam berbagai maslah kehidupan baik persoalan intern warga NU maupun masyarakat secara umumnya. Lembaga ini sangtlah penting peranannya dalam mencapai kehidupan yang harmonis dan lembaga ini pula sebagai benteng dalam menjaga, mencegah sebuah persoalan-persoalan yang ada di Indonesia.

Adapun teori-teori diatas dapat dijelaskan pada Muktamar NU ke-28 di pondok pesantren krapyak yogyakarta 1989 yang menghasilkan ada sembilan rumusan politik bagi NU sebagai berikut:

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan bahwa negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan akhirat.
3. Politik bagi NU adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama.
4. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya ber-ketuhanan Yang Maha Esa. Berkemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5. Berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan

dan norma-norma yang disepakati, serta dapat mengembangkan mekanisme dalam memecahkan masalah bersama.

6. Berpolitik bagi NU dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, dan dilaksanakan sesuai dengan akhlakul karimah sebagai pengamalan aaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apapun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan.
8. Perbedaan pandangan diantara aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan suasana persaudaraan, tawadlu, dan saling menghargai satu sama lain, sehingga didalam berpolitik itu tetap dijaga persatuan dan kesatuan di lingkungan NU.
9. Berpolitik bagi NU menurut adanya komunkasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemsyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.²⁹

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Nahdlatul Ulama diatas, maka harus ada dukungan dari umat yang memiliki sifat-sifat terpuji,

²⁹ Muhammad Tolhah Hasan, *Ahlussunah wal Jama'ah dalam persepsi dan tradisi NU*, Jakarta: lantabora Press. 2005, hlm. 369-371.

mental yang tinggi, dan mampu mengemban tugas agama maupun organisasi. Dalam hal ini tertuang pada butir-butir *Mabadiu Khaira Ummah*,³⁰ diantaranya:

1. Asshidqu

Asshidqu **الصِّدْق** bermakna jujur, bersungguh-sungguh, dan terbuka. Kejujuran atau kebenaran adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Apa yang dilahirkan sama dengan apa yang ada di dalam hati. Jujur itu meliputi ucapan, perbuatan, dan sikap yang ada di dalamnya.

2. Al- amanah walwafa bilahdi

Al- amanah walwafa bilahdi, berasal dari dua kata *alamanah* yang memiliki pengertian yang lebih umum yakni meliputi semua beban yang harus dilaksanakan, baik ad perjanjian maupun tidak. Sedangkan *alwafa bilahdi* hanya berkaitan dengan sesuatu yang terdapat perjanjian. Namun kedua istilah itu digabungkan menjadi satu kesatuan. Yang pengertiannya meliputi dapat dipercaya, setia, dan tepat janji.

3. Al adalah

Al adalah mengandung pengertian bersikap adil dan memberikan hak dan kewajiabn secara proporsional. Bersikap adil dalam menempatkan sesuatu pada tetmpatnya, berpihak kepada

³⁰ Amin Farih, Junaedi, *Op.Cit.* hlm 17-20

kebenaran, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar. Bersikap adil dituntut dari semua pihak lebih-lebih dari penguasa, hakim, pemimpin, kepala keluarga, orang lain dalam berfatwa dan sebaliknya.

4. Attaawun

Attaawun merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Pengertian *taawun* meliputi, tolong-menolong, dan gotong royong dalam kebaikan dan ketakwaan.

5. Al- Istiqamah

Al-istiqamah mengandung pengertian konsisten, ajeg, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Keajegan adalah tetap dan tidak bergeser jalur sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Kesenambungan artinya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan lain dan antara periode satu dengan periode yang lain. Sehingga semuanya merupakan satu mata rantai yang tak terpisahkan dan saling menopong. Sedangkan berkelanjutan adalah proses pelaksanaan secara terus menerus dan tidak mengalami kemandegan.

Prinsip-prinsip dasar *Mabadiu Khaira Ummah* bisa berubah atau goyah ketika warga NU tidak Istiqomah. Perubahan ini bisa diakibatkan dengan faktor kepentingan, kekuasaan warga NU khususnya Ansor pada konteks politik. menurut Khoiru Ummatin,

³¹faktor pertama adalah kekuasaan, kekuasaan ini meliputi cara-cara untuk mencapai hal diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada pada masyarakat. Kemudian faktor kepentingan, faktor kebijaksanaan yang sebagai hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan yang biasanya berbentuk perundang-undangan.

C. Tipologi Kepemimpinan dalam Tradisi Islam

Ada empat tipologi kepemimpinan yang dikenal dalam tradisi Islam pada Umumnya dan NU khususnya.³² Pertama, tipologi kepemimpinan *imamah*. Diambil dari kata imam (dalam shalat), model kepemimpinan ini bercorak sufisme dari spiritualisme dengan tingkat ketundukan nyaris total dari jamaah yang dipimpinnya. Kepemimpinan seperti ini acap memutlakkan ucapan, tingkah laku, dan gerak-gerik imam untuk diikuti oleh jamaah. Sama sekali tidak boleh ada bantahan, apalagi pembangkangan. Dalam tradisi Islam, kepemimpinan model imamah ini sangat dikenal di kalangan Muslim Syiah. Pada masa dan sisi tertentu, NU mengalami kepemimpinan model imamah ini, di mana segenap warga NU tunduk- patuh kepada pilihan, arahan, dan gerak-gerik pemimpinnya walaupun warga NU tak sepenuhnya mampu memahami pilihan-pilihan pemimpinnya.

³¹ Khoiru Ummatin, *perilaku Politik Kiai*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002, hlm, 32.

³² Hasibullah Satrawi, *Kepemimpinan NU Masa Kini, Nasionalisme Dan Islam Nusantara*, Jakarta: 2015, hlm, 202.

Kedua, model kepemimpinan *al-qiyadah*. Secara kebahasaan, *al-qiyadah* adalah kepemimpinan di medan tempur. Itu sebabnya, pemimpin yang mengambil model kepemimpinan ini disebut dengan istilah *al-qaa'id* yang berarti pimpinan pasukan atau jenderal. Pada masa dan sisi tertentu, NU juga pernah mengambil model kepemimpinan seperti ini, terutama ketika NU mengeluarkan Resolusi Jihad untuk melawan penjajah (23 Oktober 1945). Fatwa ini mewajibkan berperang kepada segenap umat Islam yang berada di radius 94 kilometer dengan penjajah. Akibatnya, sungguh dasyat, ratusan kiai dan ribuan santri dari pelbagai daerah menuju Surabaya setelah fatwa ini dibacakan oleh Bung Tomo melalui radio.

Ketiga model kepemimpinan *ar-ri'asah*. Diambil dari kata *ra'sun* yang berarti kepala, model kepemimpinan ini mempunyai peran yang hampir sama dengan kepresidenan. Itu sebabnya, negara-negara Arab yang berbentuk republik, seperti Mesir, menyebut pemimpinnya dengan istilah presiden (*ar-ra'is*). Pada masa dan sisi tertentu, NU juga pernah mengalami model kepemimpinan *ri'asah* seperti diatas, terutama dalam dua periode kepemimpinan KH. Hasyim Muzadi. Mungkin karena menjalankan model kepemimpinan seperti ini di NU, beliau sempat beramsisi dan mencalonkan diri untuk menjadi wakil presiden yang sesungguhnya, yaitu wakil presiden RI.

Keempat, kepemimpinan model *ar-ri'yah*. Secara kebahasaan, *ar-ri'ayah* bisa dimaknai perhartian, pemberdadyaan, dan tuntunan. bahkan

istilah rakyat (dalam bahasa Arab *ar-ra'iyah*) pun serapan dari kata ini. Disebut rakyat karena membutuhkan perhatian, pemberdayaan, dan tuntunan dari pemimpinnya yang disebut dengan istilah *raa'in* (orang yang memperhatikan, memberdayakan, dan menuntun).

Sedangkan Tipe Ideal Seorang Pemimpin Dalam Islam. Meski tidak ada konsep yang baku tentang bagaimana bentuk pemerintahan dan proses suksesi kepemimpinan di masyarakat muslim, dalam Al- Qur'an dan hadits telah banyak sekali disebutkan prinsip-prinsip yang harus dijalankan oleh setiap pemimpin muslim. Prinsip-prinsip tersebut sudah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, sehingga jika dijelaskan secara sistematis akan bisa menunjukkan bentuk tipe ideal kepemimpinan dalam Islam.³³ Terkait dengan hal ini terdapat suatu ayat yang sangat layak untuk menjadi pedoman bagi setiap pemimpin atau pejabat yang mengaku menjadi bagian dari *ummah Al-Qur'an*. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

³³ Malik Madani, *Politik berpayung Fiqh*, Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2010, hlm. 5.

Dalam ayat tersebut terdapat dua prinsip kepemimpinan dan pemerintahan yang sangat penting. Prinsip yang *pertama* adalah menyampaikan ‘amanat’ kepada yang berhak menerimanya. Harus diakui, dalam islam , istilah “amanat” pengertiannya sangat luas”Amanat”, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli tafsir pada umumnya, berarti segala sesuatu yang dipercayakan kepada seorang insan (*kullu ma yu’tamanu ‘alaihi al-insan*).³⁴

Namun demikian, sesuai dengan kaidah penafsiran Al-Qur’an yang telah disepakati dikalangan para ahli tafsir, cara penafsiran Al-Qur’an yang paling baik ialah menafsirkan ayat Al-Qur’an dengan ayat Al-Qur’an yang lain (*tafsir al-qur’an bi al-al-qur’an*). Kemudian pada urutan kedua adalah menafsirkan ayat Al-Qur’an dengan hadits atau sunnah Nabi (*tafsir al-qur’an bi as-sunnah*). Setelah itu, pada tingkatan di bawahnya terdapat cara-cara penafsiran yang lain. Yang perlu digarisbawahi ialah bahwa Nabi Muhammad SAW. Sendiri telah menjelaskan makna penting dari “amanat” ini ketika mengkaitkannya dengan masalah kepemimpinan atau jabatan. Dalam sabda beliau kepada Abu Dzarr al-Ghifari yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW. Bersabda:

إِنَّهَا أمانةٌ، وإِنَّهَا يومُ القِيامةِ حِزْبِي ودائمة، الأمان أخذها بحقها، وأدى الذي

عليه فيها

"Sesungguhnya jabatan itu amanat, dan sesungguhnya ia pada Hari Kiamat merupakan (sebab) kehinaan dan penyesalan, kecuali (bagi)

³⁴ *Ibid*, hlm 7.

orang yang mengambil jabatan itu dengan haknya dan menunaikan kewajibannya sehubungan dengan jabatan itu."

Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, kepala negara atau pemimpin yang pandai menjaga amanah adalah kepala negara yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang diembankan kepadanya.³⁵

Prinsip *kedua* ialah prinsip penegakan keadilan di antara manusia. Penegakan keadilan itu tidak hanya berarti keharusan merumuskan aturan hukum dan perundang-undangan yang adil dan menerapkannya secara adil di antara manusia, melainkan juga mencakup pengertian adil dalam kaitannya dengan jabatan sebagai "amanat".³⁶

Allah berfirman dalam QS. Shad: 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

"Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah".

Menurut al-Ghazali bahwa kepala negara atau pemimpin yang adil adalah kepala negara yang mengasihi rakyatnya, tidak menambah atau

³⁵ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *fiqh Siyasaht doktrin dan pemikiran politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm, 255.

³⁶ Malik Madani, *Op.Cit.* hlm, 11.

mengurangi hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, selalu menepati jalan kebenaran, memiliki rasa malu, murah hati, berani meluruskan bawahannya yang berbuat zalim, tidak sombong dan pemaarah, tidak akan senang hidup bahagia seorang diri sementara rakyatnya menderita, hidup sederhana dan tidak suka pamer kemewahan, selalu berusaha menarik simpati rakyatnya dengan cara-cara yang dibenarkan agama dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan agama dan mengundang murka Allah, serta akan menindak tegas siapa pun diantara rakyatnya yang melanggar hukum, sekalipun dengan berbuat demikian, ia rentan dibenci dan dimusuhi oleh pihak-pihak yang anti terhadap tindakan tegas yang diambilnya itu.³⁷

Menurut Aunur Rahim Fakih, sifat pemimpin yang ideal dalam islam sebagai berikut:

1. Harus mampu memimpin dan mengendalikan dirinya sendiri sebelum memimpin orang lain.
2. Memiliki kemampuan manjerial yang baik karena seorang pemimpin itu harus dipilih dari orang-orang dengan kualitas yang terbaik.
3. Memiliki konsep relasi yang baik karena seorang pemimpin harus mampu menjembatani berbagai perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

³⁷ Al- Ghazali, *Etika Berkuaasa Nasehat-Nasehat Imam al- Ghazali* (Bandung: Pustaka Hidayat, 1998), hlm.23-25.

4. Visinnya adalah Al-Qur'an, misinya adalah menegakkan kebenaran.
5. Memiliki sikap *tawadhu'* dan mawas diri dalam mengemban amanah Allah, karena pada prinsipnya kepemimpinan itu bukan saja harus dipertanggung-jawabkan di depan lembaga formal tapi yang lebih penting lagi di hadapan Allah SWT.
6. Memiliki sifat *Siddiq* (benar), *Amanah* (terpercaya), *Tabligh* (menyampaikan apa adanya), *Fathonah* (Pandai) serta menyadari sepenuhnya bahwa Allah memberikan kemampuan yang berbeda-beda bagi setiap orang (Q.S: Al-Jumlah: 4) serta menerimanya dengan rasa syukur dan ikhlas.³⁸

D. Badan Otonom NU

Organisasi Nahdlatul Ulama mempunyai tiga perangkat yang terdiri dari; lembaga, lajnah, dan Badan Otonom.³⁹ Adapun salah satu jenis dari Badan Otonom NU adalah Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama disingkat GP Ansor NU. Organisasi ini awalnya bernama Gerakan Pemuda Ansor sebagai kelanjutan dari Ansor Nahdlatul Ulama (ANO), dalam D/ART NU diubah menjadi Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama yang selanjutnya disebut GP Ansor, didirikan pada 10 Muharram 1353

³⁸ Aunur Rahim Fakih, *Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: tim UII Press 2001, hlm. 34.

³⁹ AD/ART Nahdlatul Ulama, 2015, hlm 13

Hijriyyah atau bertepatan dengan 24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur.⁴⁰

Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, gerakan pemuda Ansor pernah terlibat dalam kancah politik praktis. Kegiatan ini mulai terlihat ketika NU sebelum memisahkan diri dari partai Masyumi, NU melakukan pembenahan hubungan dengan GP Ansor secara struktur sebagai penegasan komitmen Ansor terhadap NU sebagai satu-satunya organisasi kader bagi partai NU yang akan terjun dalam dunia politik, dilaksanakan persetujuan bersama pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tanggal 2 September 1951.⁴¹ Sejak saat itu, GP Ansor menjadi dapur kaderisasi bagi partai NU. Banyaknya pemuda Ansor yang terlibat dalam kegiatan partai telah membawa perubahan secara drastis dalam tubuh NU.

Periode antara tahun 1952 hingga 1953 adalah periode dimana NU dan GP Ansor mempersiapkan diri menghadapi pemilu 1955. Salah satu bentuk persiapan tersebut adalah memperkuat jaringan-jaringan patronase dalam pemerintahan, khususnya kementerian Agama. Usaha ini digunakan untuk mengembangkan partai NU, baik dari segi keanggotaan maupun sebagai keuntungan finansial. Usaha meraih kedua tersebut mendapat dukungan kuat dari GP Ansor. Langkah yang paling nyata menurut Ansor

⁴⁰ PD/PRT gerkan Pemuda Ansor, pasal 1.

⁴¹ Choirul Anam, *Gerak langkah pemuda Ansor seputar sejarah kelahiran*, hlm. 80

yaitu dengan menyingkirkan pegawai- pegawai dari partai Masyumi yang sebelumnya banyak menguasai kementerian Agama pusat maupun daerah.⁴²

Dalam perkembangan selanjutnya Ansor terus tampil sebagai pembela dan penjunjung tinggi cita-cita partai NU. Sebagai pembela, tentu mengerahkan segala daya untuk keselamatan yang dibela. Bahkan dalam segala peristiwa apapun, sipembela harus mampu menunjukkan kesungguhannya sebagai pembela. Seperti periode sebelumnya, untuk menghadapi perhelatan politik itu, NU membutuhkan konsolidasi internal, termasuk mengonsolidasikan para pemudanya (GP Ansor) untuk dapat memberikan kontribusi terbaik bagi partai.⁴³

Dengan dukungan Ansor dan *neven* NU lainnya, partai NU pada pemilu 1971 tetap menunjukkan eksistensinya. Partai NU memperoleh suara cukup lumayan dibandingkan partai lainnya, meski harus mengakui kemenangan Golkar secara mutlak, yaitu 62,80% suara. Sementara itu, NU hanya memperoleh 18,67%, PNI 6,94% dan Parmusi 5,36%, serta beberapa perentase yang tidak signifikan diperoleh beberapa partailainnya.⁴⁴

Setelah kemenangan itu, Pada Januari 1973, presiden Soeharto menetapkan penyerdahanan sistem kepartaian. sejak saat itu lengkaplah sudah konsolidasi politik yang dilakukan Soeharto dan Orde Baru. Dalam dunia NU dan Ansor, masa-masa itu adalah masa suram, di mana tekanan

⁴² Erwin Kusuma, *op.cit.* hlm 69

⁴³ *Ibid.*, hlm 143.

⁴⁴ *ibid.* hlm 144.

demi tekanan terus dilancarkan kekuasaan kepada warga NU dan Ansor, karena menyadari potensi besar yang masih terpendam dalam kekuatan politik NU dan para pendukungnya.⁴⁵

Tekanan yang terjadi sepanjang dasawarsa tahun 70-an itu membuat kiprah organisasi NU dan Ansor menjadi tersumbat. Untuk mengakhiri kebuntuan, pada tahun 1979 Ansor kembali mengadakan konferensi besar. Pada tanggal 3-6 Januari 1979 Konferensi Besar GP Ansor digelar di Jakarta, dengan agenda penyegaran kembali fungsi GP Ansor sebagai Organisasi pemuda di Indonesia.⁴⁶

Peranan seperti itu, disadari atau tidak telah mewarnai potret GP Ansor menjadi lebih politis sosok Ansor sebagai organisasi pemuda, yang seharusnya ikut menangani problem kepemudaaan, justru malah semakin kabur. Memang secara internal sikap seperti itu sah-sah saja. Tetapi dalam konteks ke-Indonesiaan, harus diakui bahwa tingkah laku semacam itu cenderung eksklusif, dan membahayakan eksistensi organisasi.

Pada kongres VIII tahun 1980 GP Ansor mulai bangkit kembali, dengan pemimpin baru yaitu H. A. Calid Mawardi (1980-1984) setelah menggantikan Jahja Ubaid. Gp Ansor bangkit dengan penuh kesadaran akan jati dirinya, posisinya peran dan fungsinya, baik sebagai pemuda NU maupun sebagai pemuda bangsa. Di zaman Cholid pula seluruh jajaran pimpinan GP Ansor dipersenjatai lima pokok dasar strategi baru

⁴⁵ *Idib*.hlm. 145.

⁴⁶ *Ibid*

pengembangan gerakan pemuda Ansor atau yang dikenal dengan Deklarasi Semarang yang berisi sebagai berikut:

1. Melepaskan diri dari dukungan kungkungan *socia- political shock* (hempasan psikolog) yang muncul akibat perubahan sosial politik,
2. Mempersempit jarak pemisah yang ada antara GP Ansor dengan alat-alat kekuasaan Negara, baik Abri maupun instansi-instansi pemerintahan,
3. Mempertegas posisi GP Ansor dalam hubungan dengan sesama generasi muda, khususnya KNPI,
4. Mengembangkan tingkah laku kemasyarakatan yang luwes atas dasar pengamatan yang rasional dan taktis,
5. Menyeimbangkan orientasi politik dengan orientasi progam.⁴⁷

Harus diakui bahwa lima pokok strategi tersebut merupakan koreksi tajam terhadap diri GP Ansor sendiri yang disadari atau tidak, pernah melenceng dari komitmen dasarnya. Sejak lahir Ansor, Ansor telah memiliki komitmen ke-Indonesia-an yang kuat, dan karena itu ia merupakan bagian internal dari generasi bangsa. Sejak lahir, Ansor mempunyai komitmen ke- Agama-an (ke-Islam-an) yang kuat, dan karena itu, ia merupakan benteng islam dan sekaligus kader NU. Sejak lahir, Ansormempunyai komitemen ke-pemuda-an yang kokoh, dan karena itu,

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 150.

ia selalu tampil sebagai bangsa yang pemberani, jujur, cakap dan bertanggung jawab.⁴⁸

Kebangkitan dan kembalinya GP Ansor kejadiannya terus dilakukan, hal ini terlihat dalam konferensi Besar Ansor ke -8 yang dimana dalam menyikapi muktamar Nahdlatul Ulama yang diadakan beberapa saat kemudian di situbondo, Ansor bertekad menyukseskan muktamar, terutama demi menegakkan nilai-nilai luhur NU. Ansor juga menyakini kearifan ulama untuk merumuskan suatu khittah yang dapat dijadikan petunjuk dalam mengaktualisasikan hakikat NU sebagai organisasi sosial-keagamaan.⁴⁹ Setelah muktamar NU ke-27 pada tanggal 8-12 Desember 1984 di situbondo yang menghasilkan keputusan salah satunya melepaskan atau menggundurkan diri dari politik praktis.

Setelah terselenggaranya muktamar NU, ansor melakukan kongres ke IX tahun 1985. Dalam kongres ini sekaligus terpilihnya pimpinan baru ketua Umum GP Ansor periode 1985-1989 yaitu Slamet Effendy Yusuf. Slamet juga menyatakan, Ansor yang dipimpin akan melaksanakan sepenuhnya keputusan hasil muktamar NU yang diakui sebagai rumusan cemerlang. Sikap menjaga jarak yang sama Ansor dinilainya adalah sikap tepat, sesuai dengan kondisi sosial-politik Indonesia saat itu. Dengan cara

⁴⁸ Choirul Anam. *Op.cit.* hlm. 153.

⁴⁹ *Kompas*, 2 Desember 1984.

itulah, Ansor sebenarnya ingin memberikan pelajaran kepada masyarakat untuk berpolitik secara dewasa dan rasional.⁵⁰

Khittah NU 1926 juga terus dilakukan oleh Nusron Wahid selaku ketua umum GP Ansor periode 2010-2015 setelah menggantikan Effendy. Dalam pidato kemenangannya, nusron menjanjikan akan merubah citra Ansor agar tidak dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda politik (OPK politik). Perubahan citra ini tidak hanya dilakukan dengan pernyataan, tapi juga tindakan. Dan dia juga menegaskan bahwa ia tidak akan membawa Ansor ke politik.⁵¹

Dari beberapa paparan tersebut diatas nampaklah betapa besar peran GP Ansor dalam politik. namun setelah teretusnya khittah NU, Ansor mengambil sikap untuk kembali sesuai peran dan fungsinya sebagai organisasi pemuda, serta menjalankan amanah isi dari Khittah NU 1926.

⁵⁰ *Kompas*, 24 Desember 1985.

⁵¹ Choirul Anam. *Op.cit.* hlm 228.

BAB III

**KETERLIBATAN PIMPINAN ANAK CABANG GERAKAN
PEMUDA ANSOR PEDURUNGAN DALAM PILWAKOT
SEMARANG 2015**

**A. Keberadaan Pimpinan Anak Cabang GP Ansor Pedurungan Kota
Semarang**

Secara geografis Kecamatan pedurungan bagian dari 16 kecamatan yang berada di wilayah Kota Semarang terletak -10 km dari Kota Semarang dengan batas-bats:

- Sebelah Utara kecamatan Genuk
 - Sebelah Timur kecamatan Mranggen
- Kabupaten Demak
- Sebelah Selatan Kecamatan Tembalang
 - Sebelah Barat Kecamatan Semarang Selatan Gayamsari

Luas wilayah Kecamatan Pedurungan 4.070.63 Ha terdiri dari:

- Tanah sawah
- Tanah kering
- Tanah basah
- Tanah keperluan fasilitas umum

Pembagian wilayah administrasi kecamatan Pedurungan terdiri dari 12 Kelurahan, antara lain:

- 1) Kelurahan Pengaron Kidul
- 2) Kelurahan Tlogomulyo
- 3) Kelurahan Tlogosari Wetan
- 4) Kelurahan Tlogosari Kulon
- 5) Kelurahan Muktiharjo Kidul
- 6) Kelurahan Plamongansari
- 7) Kelurahan Gemah
- 8) Kelurahan Pedurungan Kidul
- 9) Kelurahan Pedurungan Lor
- 10) Kelurahan Pedurungan Tengah
- 11) Kelurahan Palebon
- 12) Kelurahan Kalicari

Dalam Peraturan Rumah Tangga GP Ansor, terdapat tingkat kepengurusan GP Ansor dimulai dari tingkat Pusat Sampai tingkat Ranting atau kelurahan. Pengurus pimpinan pusat sampai pimpinan Ranting adalah kader Gerakan Pemuda Ansor yang menerima amanat kongres atau konferensi untuk memimpin dan memegang tanggung jawab organisasi sesuai dengan tingkatannya. Pimpinan Cabang GP Ansor kota Semarang mempunyai Anak Cabang yang terdapat di 14 Kecamatan dan sekitar 90 Ranting yang sudah dibentuk atau yang sudah ter-Sk-kan.

Sedangkan 14 Kecamatan yang sudah terbentuk, diantaranya Pimpinan Anak Cabang GP Ansor kecamatan pedurungan yang di

dipimpin oleh Sahabat dr. Sholkan periode 2012- 2015. PAC GP Ansor pedurungan ini mempunyai 12 Ranting, diantaranya:

1. Ranting Tlogosari Wetan
2. Ranting Tlogosari Kulon
3. Ranting Gemah
4. Ranting kalicari
5. Ranting muktiharjo Kidul
6. Ranting Palebon
7. Ranting Pedurungan Kidul
8. Ranting Pedurungan Lor
9. Ranting pedurungan Tengah
10. Ranting penggaron Kidul
11. Ranting Plamongan Sari
12. Ranting Tlogomulyo

Namun dari 12 Ranting tersebut ada 2 kelurahan yang belum terbentuk, yaitu kelurahan Kalicari dan kelurahan Pedurungan Kidul.¹

PAC GP Ansor pedurungan ini mempunyai 8 Lembaga, diantaranya; lembaga Rijalul Ansor, lembaga Ekonomi, lembaga Advokasi, lembaga Kaderisasi dan Banser, lembaga kesehatan, lembaga lingkungan hidup, lembaga olah raga dan kebudayaan, dan lembaga

¹ Surat Keputusan Pimianan Cabnag GP Ansor kota Semarang 2014.

hubungan masyarakat.² Kegiatan-kegiatan yang berjalan adalah Rijalul Ansor, berwirausaha dan kaderisasi.

B. Peta Pilwakot Semarang Tahun 2015

Berlakunya Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menciptakan suasana baru dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan walikota (pilwakot), baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Apabila sebelumnya gubernur, bupati dan walikota dipilih oleh sekelompok orang tertentu, yakni para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan tingkatannya masing-masing, maka dengan berlakunya UU tersebut mereka harus dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat yang memiliki hak pilih di masing-masing daerah. Karena cara pemilihan kepala daerah tidak lagi melalui lembaga perwakilan, melainkan langsung oleh rakyat, maka sebagian orang menyebutnya sebagai *PILKADAL* (pemilihan kepala daerah secara langsung).³

Sistem pilkada ini, pada kenyataannya, telah menambah semarak proses demokrasi di Indonesia. Hal ini karena pilkada membuka keterlibatan seluas-luasnya segenap rakyat dalam proses pemilihan pemimpin pemerintahan daerah mereka. Selain merupakan implikasi dari posisi pemerintahan daerah yang menjadi lebih otonom dari pemerintah pusat, keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam proses berdemokrasi tampaknya juga melatarbelakangi lahirnya UU diatas.

² Dokumen PAC GP Ansor pedurangan.

³ Malik Madani, *Op. Cit*, hlm. 21.

Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pemilihan Walikota (Pilwakot) di Kota Semarang, telah diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Dalam Pilwakot tersebut tercatat tiga pasangan calon walikota, yakni pasangan nomer urut ke-1 Drs. H. Soemarmo HS, Msi.- H. Zuber Safawi S.Hi (MaZu), Pasangan nomer urut ke-2 Hendrar Prihadi,SE, MM - Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu (Hendi-Ita), dan terakhir Pasangan nomer urut ke-3 Sigit Ibnugroho Sarasprono - Agus Sutyoso (SibaGus). Mereka berlomba memperoleh 1.109.045 pemilih.

Pasangan Soemarmo-Zuber diusung dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hendrar Prihadi- Ita disung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), DEMOKRAT, dan Partai Nasional Demokrat (NASDEM). Sedangkan Sigit Ibnunugroho- bagus diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia (Gerinda), dan Partai Golongan Raya (Golkar).⁴

Para pasangan calon walikota melakukan kampanye, kegiatan olahraga dan kegiatan sosial ke berbagai daerah sesuai dengan dapil yang sudah ditentukan oleh KPUD kota Semarang dan kampanye ini dimulai dari bulan Agustus sampai bulan November. Adapun Dapil 1 terdiri dari; kec. Semarang Barat, Kec. Semarang Selatan, kec. Semarang Utara, kec. Semarang Tengah, kec. Semarang Timur. Dapil 2 terdiri dari daerah Kec. Gayamsari, Kec. Pedurungan, kec. Genuk, kec.Tembalang, kec.Candisari,

⁴ <https://id.m.wikipedia.org>, pemilihan umum wali kota semarang 2015. Diakses tanggal 21 Mei 2016.

dan Dapil 3 terdiri dari kec. Gajahmungkur, kec. Banyumanik, kec. Gunung Pati, kec. Mijen, kec. Ngaliyan, kec. Tugu.⁵

Disela-sela kampanye para pasangan calon walikota tentunya juga memaparkan visi-misi mereka, adapun visi-misinya sebagai berikut;

1. Pasangan calon nomer urut1, Marmo-Zuber (MaZu)

Visi : Semarang Bangkit Menuju Kota Metropolitan Yang Berbudaya, Relegius Dan Sejahtera.

Misi :

- 1) mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat kota semarang yang berkualitas,
- 2) mewujudkan pemerintahan kota semarang yang efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
- 3) mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan.
- 4) mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah.
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya, religius dan sejahtera.

2. Pasangan calon nomer urut 2, Hendi-Ita

Visi : Semarang Kota Perdagangan Dan Jasa Yang Hebat Menuju Masyarakat Semakin Sejahtera.

Misi :

⁵ Lihat lampiran berita acara kampanye kota Semarang 2015

- 1) mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik
- 3) Mewujudkan kota metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan.
- 4) Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang kondusif.

3. Pasangan calon nomer urut 3, Ibnu Nugroho-Agus.

Visi : Terwujudnya Semarang Kota Bermartabat

Misi :

- 1) Membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel, yang didukung oleh birokrasi yang berintegritas, kompeten, profesional, efektif, dan efisien untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan sosial.
- 2) Mengembangkan tata ruang yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur, sistem transportasi, ruang publik, dan teknologi informasi.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan keberpihakan pada ekonomi kerakyatan, kemitraan pengusaha, dan iklim usaha yang produktif, dll.

Dukungan kepada pasangan calon terus dilakukan, seperti halnya PAC GP Ansor pedurungan 80% mendukung ke pak Marmo, walikota yang diusung oleh partai kebangkitan bangsa (PKB) dan partai keadilan sejahtera (PKS). Namun ada Ansor yang tidak mendukung ke pak marmo antara lain Ansor ranting kelurahan palebon dan ranting kelurahan muktiharjo. Dalam perkembangan selanjutnya mendekati pemilihan ansor tlogosari wetan dan gemah pecah dari yang semula dukung ke pak marmo menjadi tidak, ini dikarenakan perbedaan aqidah dan terjadinya kampanye hitam (*black campaign*) yang menjelek-jelekan pak marmo.⁶

Kemudian pengamatan yang dilakukan peneliti pada tanggal 2 November 2015, kekuatan pasangan nomor urut 1 (Soemarmo-Zuber) terus diberikan oleh Ansor Kota Semarang khususnya PAC GP Ansor Pedurungan pada kegiatan apel kebangsaan dalam rangka memperingati hari santri nasional dan hari sumpah pemuda bertempat di Pedurungan.

Dalam upacara apel tersebut inspektur atau pemimpin upacaranya adalah Soemarmo. Sebelum upacara dimulai juga dilakukan tradisi NU yaitu tahlilan, kegiatan ini dilakukan di kediaman ketua PAC GP Ansor pedurungan.

C. Keterlibatan PAC GP Ansor pedurungan dalam pilwakot

Terselenggaranya Pemilihan Walikota Semarang pada tanggal 9 Desember 2015, banyak melibatkan ormas-ormas yang ada di kota Semarang. Para calon Walikota tentunya menyiapkan atau membentuk Tim

⁶ Hasil wawancara dengan Ali Munawir salah satu tim pemenang, tanggal 16 Mei 2016

untuk membantu memenangkan Pilwakot tersebut. Salah satunya pemuda ormas keagamaan yaitu Gerakan Pemuda Ansor kota Semarang yang tergabung dalam tim pemenang pak marmo. Adapun Tim sukses pak Marmo Zuber (MaZu) ada 6 tim diantaranya; Ansor, Pemuda Pancasila, Lindu Aji, Tim 11, PKB dan PKS. Tim dari Ansor didalamnya didominasi anggota dari Ansor pedurungan.

Tim pemenang calon nomer urut 1 ini tentunya banyak upaya-upaya yang dilakukan. Seperti halnya upaya-upaya yang dilakukan untuk pemenangan pak Marmo, PAC GP Ansor Pedurungan melakukan berbagai cara; *Pertama*, pengumpulan data masyarakat terutama terhadap keluarga masing-masing anggota Ansor.

Menurut Ali Munawair, upaya-upaya yang dilakukan dalam memenangkan pak marmo. T tutur sahabat:

“saya selaku salah satu tim pemenang dari pak marmo, melakukan kampanye terhadap yang non ansor dengan menjual suara pak marmo, dengan menyatakan kepada masyarakat bahwa pak marmo sudah terbukti kinerjanya, dan mengingatkan yang baik-baik waktu dulu menjadi wali kota Semarang”.⁷

Pendataan ini dilakukan kepada masing-masing keluarga Ansor atau tim, tim Ansor di usahakan mendapatkan 10 suara paling minim.

Kedua, Ansor juga terlibat menjadi saksi-saksi dari tim pak marmo di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

⁷ *Ibid*

Menurut Jamhuri, selaku saksi dari Ansor yang juga menjadi tim dari pak Marmo. Sahabat jamhuri menyatakan:

“saya selaku saksi dari pak marmo yang dialukan membaca situasi peta politik warga, kemudian melakukan pendekatan untuk memastikan bahwa mereka itu berpihak kepada kita, setelah itu kita mencatat nama-nama yang kita datangi setelah tercatat masuk hari pemilihan, diusahakan mereka disambut dengan baik, dan ternyata hasilnya 90% tidak meleset dari yang saya data”.⁸

Ketiga, melakukan pengamanan atau pengawal setiap kampanye Marmo. Menurut Jamhuri, pengawalan ini dilakukan setiap kunjungan (*blusukan*) Soemarmo didaerah- daerah warga kota Semarang, dan selalu memakai jasa pengawalan dari Banser dan Pemuda pancasila.⁹

Adapun pengawalan dilakukan keberbagai daerah, diantaranya; sedekah kali yang dilakukan di tambak lorok, pengajian peresmian masjid Nahdaltul Ulama Baiturrohim di Tembalang pada tanggal November 2015, pengobatan masal disetiap kecamatan, dan pengawalan kampanyanya Marmo Zuber (MaZu) pada tanggal 30 November 2015 di GOR tri lomba juang Kota Semarang.

Peneliti melihat, kampanye Soemarmo di GOR tri lomba juang. Ansor terlibat hanya sebagai pengawal dan pengamanan. Dalam Kampanye tersebut juga dihadiri ketua DPP PKB sekaligus sebagai *jurkam* MaZu.

⁸ Hasil wawancara dengan Jamhuri tanggal 21 Mei 2016.

⁹ *Ibid*

Sebetulnya pengamanan dan pengawalan ini diberikan kepada seluruh pasangan calon walikota, terutama kepada pihak yang mengajukan permohonan baik secara tertulis maupun permohonan secara lisan. Sesuai dengan isi surat mandat dari KH. Shodiq Hamzah selaku Rois Syuriah Pimpinan Cabang NU kota Semarang.¹⁰

Namun penulis menganggap bahwa PAC Ansor Pedurungan telah memanfaatkan surat dari Rois Syuriah NU tersebut digunakan hanya untuk mengawal ke salah satu kandidat, yaitu Marmo-Zuber.

Dari paparan diatas tentunya ada yang melatar belakangi munculnya upaya untuk memenangkan pasangan walikota nomer urut satu itu. Dalam hal ini Penulis akan memaparkan penyebab-penyebabnya. *Pertama*, Karena adanya arahan personal tokoh NU yang *statementnya* kecenderungan mendukung dukung ke Pak Marmo. menurut M. Busro selaku ketua PC Ansor kota Semarang, sahabat menuturkan

“ada tiga kyai yang itu juga termasuk tokoh NU mencondong ke pasangan nomer urut satu (Marmo-Zuber), yaitu KH. Shodiq Hamzah, kyai Shodiq Sumadi, kyai Tohir Husnan, yang agak tidak konsisten itu kyai Shodiq Hamzah, karena di forumnya Hendi dukung Hendi, di forumnya Marmo dukung Marmo”.¹¹

kedua, Karena organisari Ansor dekat dengan PKB dan partai mendukung pak Marmo maka, Ansor siap mengawal kemenangan pak Marmo.

¹⁰ Lihat, Surat dari PCNU kota Semarang Ansor tanggal 20 Agustus 2015

¹¹ Hasil wawancara dengan Muhamad Busro tanggal 16 Mei 2016

ketiga Disebabkan melihat sosok pak Marmo yang baik saat menjabat sebagai walikota Semarang dan juga mampu mengembangkan kota Semarang.¹²

Begitu juga menurut Ali Munawir, sebab terjadinya dukungan ke pak marmo, karena ideologi pak marmo sebagai warga NU dan program-program yang ditawarkan pak marmo sangat pro dengan rakyat, terutama warga Nahdliyin. Semisal programnya; Guru ngaji akan dibisyarohi 500 ribu per bula dan akan dilakukan bingkisan untuk kyai pertahun.

Sedangkan faktor-faktor yang mengakibatkan keterlibatan PAC GP Ansor Pedurungan dan mendukung ke Soemarmo, dikarenakan adanya sebuah kepentingan dari GP Ansor dengan Soemarmo, yang dimana terjadi dalam sebuah pertemuan Ansor dengan Soemarmo dan pertemuan tersebut menghasilkan sebuah janji-janji yang diberikan oleh Soemarmo kepada Ansor:

1. Banser Ansor akan dijadikan sebagai keamanan dalam pembangunan pasar johan.¹³
2. Ketika nanti jadi walikota, marmo akan menghidupkan Ansor dan pak marmo akan mewajibkan kepada lurah untuk meberikan seragam kepada 10 personel banser, 500 seragam untuk tingkat kecamatan.¹⁴

¹² Hasil wawancara dengan Sholkhan tanggal 18 Mei 2016

¹³ Hasil wawancara dengan Zamah Syari tanggal 15 Mei 2016

¹⁴ *Ibid*, Ali Munawir.

BAB IV

ANALISA TERHADAP FATROR-FAKTOR YANG MENDORONG KETRELIBATAN PIMPINAN ANAK CABANG GP ANSOR PEDURUNGAN DALAM PILWAKOT SEMARANG 2015

Sebelum menganalisa terhadap faktor-faktor yang mendorong keterlibatan Ansor dalam pilwakot 2015 di kota Semarang, peneliti terlebih dahulu akan mengulas tentang teori Khittah Nahdliyin dalam berpolitiknya warga Nahdlatul Ulama (Ansor).

Pada dasarnya pengertian Khittah NU merupakan landasan berfikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. Landasan tersebut adalah faham Islam *ahlussunnah wal jamaah* yang dimana terdapat prinsip-prinsip umat yang baik (*mabadiu khoira ummah*), guna membentuk identitas dan karakter warga NU yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.

Dasar-dasar amal keagamaan ataupun kemasyarakatan diuraikan dalam dasar-dasar faham keagamaan Nahdlatul Ulama menguraikan khittah NU yang menyangkut kehidupan politik. di dalamnya dicantumkan pedoman, setiap warga NU harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Menurut kyai Achmad Sidiq dalam pandangan dan pemikirannya tentang Ulama dan Pancasila, salah satunya politik merupakan hak asasi setiap warga negara termasuk warga Nahdliyah. Akan tetapi NU bukanlah suatu wadah kegiatan politik praktis. Namun Nahdlatul Ulama menghargai setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Berdasarkan hal itu, maka NU memberi kebebasan warganya untuk masuk atau tidak masuk suatu organisasi politik dan menyalurkan aspirasi politiknya melalui organisasi partai tersebut selama hal itu bermanfaat bagi perjuangan Islam.

A. Analisa Latar Belakang Keterlibatan PAC GP Ansor Pedurungan Pilwakot Semarang 2015

Dalam hal ini penulis akan menganalisa latar belakang Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Pedurungan terlibat dalam pemilihan walikota Semarang 2015 yang juga mencondong ke salah satu kandidat calon wali kota yaitu Marmo-Zuber.

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa motivasi terlibatnya Ansor Pedurungan kedalam kancah politik praktis dikarenakan beberapa sebab, *pertama* pernyataan yang disampaikan dari salah satu tokoh atau kiai NU, pernyataannya mencondong kesalah satu calon kandidat.

Dalam warga Nahdaltul Ulama, kiai menempati tokoh sentral dari semua sistem dan kehidupan.¹ Bahkan ia juga menjadi *top leader* dan panutan bagi masyarakat khususnya warga NU. Oleh karena itu, baik secara politis maupun sosiologis, kiai menjadi salah satu kekuatan sosial politik tersendiri. Posisi demikian menjadi kiai mempunyai keabsahan (*legitimacy*) dalam menata dan mengatur masyarakat. Kiai tidak sekedar menjadi tokoh agama, namun ia juga tokoh politik yang terlibat dalam kegiatan dan proses politik.

Itu lah sebabnya dalam perpolitikan Indonesia kiai selalu menjadi “incaran” bagi partai-partai politik. karena itu tidak sedikit kiai NU terliabta langsung dalam partai politik dan menjadi anggota legislatif. Sikap politik kiai demikian lebih diartikan sebagai formalisasi dari kepemimpinannya selama ini.

NU memiliki karakteristik tersendiri dari organisasi lain. Salah satu di antra itu adalah otoritas dan kepemimpinan Ulama.² Dalam lingkungan NU, ulama memiliki posisi yang sangat strategis, di samping karena pengaruh tradisi keagamaan yang dikembangkan, yakni paham *Ahlussunn wa al-Jama'ah* yang mengharuskan penghormatan dan otoritas

¹ Dalam AD/ART NU, kiai memiliki posisi penting, bahkan telah melembaga syuriah, suatu jabatan yang memiliki otoritas mengendalikan organisasi NU, sementara tanfidziyah hanya berfungsi sebagai pelaksana organisasi. Lihat AD-NU pasal 7 ayat 1-2.

² Ulama (mufrad; alim) berarti orang yang berilmu atau sarjana. Karena itu ada ulama fiqh, ulama hadits, tafsir falak hisab, wirid, tarekat dan sebagainya. Dalam terminology Bahasa Jawa, ulama diistilahkan dengan kiai, yaitu gelar kehormatan yang diberikan masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki atau memimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab klasik kepada para santrinya. Di Jawa Barat (bahasa Sunda) kiai disebut ajengan, baca Dhofier, hlm.55

ulama, juga pemilihan nama organisasi Nahdaltul Ulama (kebangkitan Ulama) menggambarkan posisi sentral ulama dalam NU.

Kedudukan Ulama yang sentral, sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari akar budaya yang berkembang di masyarakat juga. Pada mulanya, paham keulamaan itu hanya berlaku di kalangan pesantren dan masyarakat sekelilingnya. Tata hubungan antara santri dengan kiai dan anggota masyarakat dengan pesantren, penuh simbol kesopanan yang pada dasarnya pengakuan terhadap kepemimpinan dan otoritas ulama. Namun dengan lahirnya NU, paham keulamaan ini semakin menampakkan bentuknya dalam formulasi yang cukup jelas. Penempatan Lembaga Syuriyah pada struktur paling atas dalam kepengurusan NU merupakan bukti perwujudan paham keulamaan tersebut.

Secara formal keharusan mengakui kedudukan dan otoritas ulama tertulis dalam AD-ART NU Pasal 7, ayat 1-2:

“kepengurusan NU terdiri dari Syuriyah dan Tanfidiyyah. Syuriyah merupakan pemimpin tertinggi NU yang berfungsi membina, membimbing, mengarahkan dan mengawasi kegiatan Nahdlatul Ulama. Sedangkan Tanfidiyyah merupakan pelaksana sehari-hari”.³

Selain itu, pengurus Syuriyyah yang terdiri dari para ulama atau kiai, mempunyai *hak veto* dalam tugasnya sebagai pengawas organisasi. Hal *veto* itu dicantumkan secara jelas dalam ART-NU

³ AD-NU pasal 7, ayat 1-2, sebagaimana dikutip Hamdani, *Perilaku Politik Kiai Kaliwungu*, hlm. 20

“Dalam rangka pembinaan, pembimbingan dan pengawasan, maka Syuriyyah berkewajiban setiap saat memberikan teguran, saran dan bimbingan kepada seluruh perangkat organisasi.

Apabila suatu keputusan atau kebijaksanaan suatu perangkat organisasi dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka Syuriyyah berhak membatalkan. Dan pembatalan tersebut diambil dalam suatu rapat pengurus Syuriyyah lengkap”.⁴

Dari uraian di atas peran Ulama atau Kiai di dalam NU tidak sekedar pemimpin tertinggi, melainkan juga pengawas, pembimbing, pembina dan penegur apabila ada penyimpangan. namun apa yang terjadi dilapangan kiai justru masih terlibat dalam politik praktis, maka tak heran jika Ansor menganut apa yang kiai lakukan.

Tindakan kiai Shodiq Sumadi yang juga sebagai pengurus Nahdaltul Ulama sekaligus pengurus partai politik, ini sudah menunjukkan sebuah ketidak taatan kepada keputusan Muktamar. Tertuang dalam penetapan pandangan dan sikap politik, salah satunya keterpisahan NU secara organisatoris dengan suatu partai atau organisasi politik diwujudkan antara lain melalui larangan perangkapan jabatan kepengurusan harian partai atau organisasi politik mana pun dengan kepengurusan harian di lingkungan *Jam'iyah* NU.⁵

Kedua disebabkan karena kedekatan GP Ansor dengan PKB, semakin dekat Ansor dengan PKB, semakin sulit bagi Ansor tidak

⁴ Hamdani, *Perilaku Politik Kiai Kaliwungu*, hlm 21.

⁵ Asmawi, *Op.Cit.* hlm. 54

mendukung calon yang diusung partai tersebut. Sebab ketika melihat sejarah, Partai Kebangkitan Bangsa merupakan partai yang direstui dan diberi fasilitas khusus oleh para elite PBNU, yang tokoh sentralnya adalah Gus Dur, sehingga Gus Dur dan NU tidak bisa dipisahkan.

Kedekatan NU dengan PKB berawal ketika diadakan istighosah kubro di Jawa Timur, dan banyak kiai berkumpul di kantor PWNU Jatim. Mereka mendesak KH. Cholil Bishri supaya menggalang dan membidani pendirian partai bagi wadah aspirasi politik NU. Kemudian Mbah Cholil mengundang 20 kiai untuk membicarakan hal tersebut, dalam pertemuan itu terbentuklah sebuah panitia yang disebut dengan Tim “Lajnah”. panitia beserta Tim NU mengadakan semacam konferensi besar di Bandung mengundang seluruh PWNU se-Indonesia. Hari itu diputuskan nama Partai Kebangkitan Bangsa.⁶ Dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lahir atas dasar responsi warga NU terhadap tuntutan reformasi di bidang politik dan terhadap kehendak penyaluran aspirasi politik kaum *Nahdliyin* secara bebas dan demokrasi. Guna menghindari kejumuhan antara partai sebagai wadah aspirasi politik warga NU dengan Jam’iyah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan yang menjadi perekat keagamaan warga NU.⁷

Menurut Rozikin Daman, Pola hubungan antara NU dan PKB bersifat *historis, kultural, dan aspiratif*. Hubungan historis berarti setiap anggota dan aktivis PKB menyadari bahwa partai ini dirintis dan dilahirkan

⁶ Nur Kholik Ridwan, *Berdirinya Partai Berbasis NU*, hlm. 334.

⁷ Asmawi..hlm 52.

oleh tokoh-tokoh NU (bahkkn oleh PBNU), sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan kehidupan politik bangsa dan tekad melaksanakan cita-cita politik NU dalam upaya mengangkat harkat dan martabat warganya. Dengan demikian, setiap anggota dan aktivis PKB secara substansial merasa ada keterikatan dengan NU yang menjiwai seluruh aktivitas anggota dan aktivitas partai. Bahkan dalam kenyataan pada umumnya aktivitas PKB adalah aktivitas NU. Adapun hubungan yang bersifat kultural artinya bahwa para anggota dan aktivis PKB bersal dari lingkungan budaya keagamaan yang sama, yaitu dari kelompok yang dibentuk oleh nilai-nilai tradisi sosial-keagamaan Islam *Ahlussunah wwal Jamaah*. Meskipun PKB dilihat secara formal dari segi asas dan progamnya bersifat kebangsaan dan terbuka atau inklusif, tetapi dilihat dari segi budaya konstituen sebagai pendukung utamanya lebih bersifat eksklusif, yaitu kelompok tradisionalis muslim (NU), sehingga sulit dibedakan dan dilepaskan dari asumsi bahwa pendukung PKB adalah orang-orang NU, meskipun tidak semua orang NU adalah pendukung PKB. Oleh karena itu, dilihat dari segi aspiratif, aspirasi politik NU tersalurkan lewat PKB dan sebaliknya, PKB menjalankan aspirasi politik NU.⁸

Menurut peneliti, secara fenomenologi dari peristiwa NU keluar dari politik praktis kemudian melahirkan PKB guna menampung aspirasi politik warga NU, ini merupakan salah satu bentuk untuk menjaga Khittah

⁸ Rozikin Daman, Op.Cit. hlm 220.

NU. Namun Ansor Pedurungan melakukan dukungannya ke Soemarmo karena dekat dengan PKB ini hanya sebagai alasan supaya tidak melanggar Khittah.

Ketiga, melihat sosok Soemarmo yang baik dan mampu mengembangkan Kota Semarang saat menjabat sebagai walikota.

Menurut penulis, motivasi ini hanya sebagai pandangan sesaat atau seketika dari GP Ansor itu sendiri. Sebab ketika melihat kasus yang dialami Soemarmo sebagai mantan narapidana sudah tidak pantas didukung lagi dan tidak sesuai dalam tipe kepemimpinan dalam islam.

Kepemimpinan yang dibutuhkan oleh warga NU kedepan adalah pemimpin yang memperhatikan, memberdayakan, dan menuntun rakyat atau yang disebut *ar-ri'ayah*. Dalam satu kaidah fiqh disebutkan, *tasharrafu al-imam 'ala ar'raiyah manutun bilmaslahah* (kebijakan seorang pemimpin harus atas dasar kemaslahatan rakyat)

B. Faktor-Faktor yang Mendorong keterlibatan PAC GP Ansor Pedurungan

Menurut teori yang ditawarkan oleh Khoiru Ummatin, ada faktor-faktor yang mempengaruhi terlibat dalam politik praktis dalam hal ini pilwakot Semarang 2015. *Pertama*, faktor kekuasaan, meliputi cara untuk mencapai hal yang diinginkan melalui sumber-sumber kelompok yang ada di masyarakat. *Kedua*, faktor kepentingan, merupakan tujuan yang dikejar oleh pelau-pelaku atau kelompok politik. *ketiga*, faktor kebijaksanaan sebagai hasil dari intruksi antara kekuasaan dan kepentingan yang

biasanya berbentuk perundang-undangan dan *keempat*, budaya politik, merupakan orientasi subyektif individu terhadap sistem politik.

Jika dilihat dari klasifikasi yang ditawarkan oleh Khoiru Ummatin, peneliti melihat hanya faktor kepentingan yang bisa mempengaruhi keterlibatan Ansor dalam pilwakot 2015. Sebab program-program yang ditawarkan oleh pak marmo sangat menguntungkan bagi Ansor, itu kalau dilihat dari programnya. Kalau dilihat dari faktor kepentingan lain disebabkan karena adanya janji-janji yang diberikan kepada Ansor. Seperti Mamro menjanjikan ketika pembangunan pasar Johar keamanan akan diberikan kepada Ansor dan Ansor dikota Semarang akan diperhatikan. Ini kalau dilihat dari faktor eksternal, sedangkan ketika dilihat dari faktor internalnya, banser Ansor akan diberikan seragam oleh kecamatan atasa perintah dari Soemarmo ketika jadi Walikota.

Kemudian faktor lainnya; *Deal*. Adanya sebuah kesepakatan atau *deal* antara GP Ansor dengan Soemarmo untuk memenangkan dalam pemilihan walikota. Kesepakatan ini muncul dari adanya sebuah janji-janji Soemarmo yang diberikan kepada Ansor.

Naluri Ansor untuk masuk politik praktis yang terlihat di pilwakot Semarang bisa dibilang cukup tinggi. Efek dari permainan politik mau tidak mau harus diterima oleh Ansor, yaitu terjadinya perbedaan pendapat dan cara pandang, di Pedurungan para Anggota Ansor telah di-kotomi-kan

sedemikian rupa seperti terpecah dalam kelompok misalnya ada kelompok calon walikota Marmo-Zuber dan ada kelompok Hendi-Ita.

Penulis melihat, bahwa keterlibatan Ansor Pedurungan dalam Pemilihan walikota Semarang, merupakan sebuah kepentingan semata, Seharusnya politik warga NU adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integrasi bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin, dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan akhirat.

Disisi lain politik yang dilakukan Ansor tidak mengacu pada Khittah NU dan prinsip-prinsip sebagai warga Nahdliyin yang sudah dirumuskan oleh para Ulama. Salah satu prinsipnya yang terdapat dalam butir-butir *mabadiu Khaira Ummah* yaitu *Al amanah walwafa bilahdi*, yang dimana warga NU khususnya Ansor harus melaksanakan, mengemban amanah yang sudah dijanjikan dan ditetapkan dalam Khittah NU.

Dari analisis diatas, penulis dapat mengambil sedikit benang merah, keterlibatan Ansor dalam pilwakot ternyata belum bisa menjalankan amanah dan tidak sah menurut khittah NU 1926. Khittah melarang berpolitik praktis dan membawa nama Nahdaltul Ulama, namun Ansor membawa atribut sebagai Banom NU digunakan untuk mengawal pasangan calon walikota saat kampanye.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai salah satu Badan Otonom NU, Ansor harus wajib patuh terhadap Khittah NU 1926 yang sudah menjadi landasan berfikir, bersikap, dan bertindak warga NU. Namun yang terjadi pada Pilwakot Kota Semarang 2015, sebagian tokoh NU justru terlibat dalam politik praktis. Sehingga Ansor pun juga terlibat dalam pilwakot, ini dikarenakan ketiadaan contoh dari tokoh NU sendiri.

Dari hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai keterlibatan Pimpinan Anak Cabang Ansor Pedurungan dalam Pilwakot Semarang 2015. Yaitu:

1. Bahwa latar belakang keterlibatan PAC GP Ansor Pedurungan dan terjadinya dukungan kesalah satu calon walikota Semarang dikarenakan. *pertama*, pernyataan disampaikan tokoh NU yang condong mendukung kesalah satu calon walikota Semarang. *Kedua*, karena kedekatan GP Ansor dengan Partai Persatuan Pembangunan (PKB), partai mengusung Marmo-Zuber. *Ketiga*, terpesonanya Ansor kepada Soemarmo yang dimana programnya begitu sangat menguntungkan bagi masyarakat khususnya Ansor.
2. Ada beberapa faktor penyebab terlibatnya Ansor Pedurungan dalam pemilihan walikota Semarang 2015 yaitu; *pertama*, disebabkan oleh kepentingan, baik kepentingan internal maupun

kepentingan eksternal organisasi GP Ansor. *Kedua*, kesepakatan yang dilakukan antara Soemarmo dengan Ansor untuk memenangkan dalam pilwakot tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan pengalaman pilwakot Semarang 2015 Ansor telah banyak terlibat dalam kepentingan politik praktis. Sehingga dalam keterlibatannya melupakan kebijakan Khittah NU yang melarangnya untuk tidak terlibat dalam kancah politik praktis. Dari hal demikian ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

1. Hendaknya Ansor kembali pada peran dan fungsinya sebagai Banom NU yang bergerak di kepemudaan.
2. Ansor hendaknya tidak masuk dalam politik praktis. Ketika ingin berpolitik jangan membawa nama Banom NU, harus melepaskan atribut sebagai Badan Otonom NU dan sebagai ketua atau orang yang berpengaruh dalam Ansor jangan terlibat dalam politik praktis. ketika terlibat dalam politik, secara moral Ansor harus tetap menunjukkan jati dirinya sebagai warga *Nahdliyin*.
3. Ansor sebagai organisasi pemuda atau Badan Otonom Nahdlatul Ulama, hendaknya berkomitmen memegang dan melaksanakan Khittah NU dan pengurus NU sebagai Bapak dari Ansor harus memberikan contoh yang baik dan menindak tegas ketika Ansor terlibat dalam politik praktis.

C. Penutup

Rahmat dan rahim Allah SWT yang telah memberikan semangat dan kekuatan penulis untuk tetap menyelesaikan skripsi ini. Dan atas segala limpah kasih dan rahmat-Nya penulis memanjatkan Syukur *Alhamdulillah*.

Upaya maksimal telah penulis lakukan untuk mencapai hasil yang optimal. Namun penulis sadar bahwa hasil ini masih jauh dari ideal, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan tenaga penulis. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. semoga apa yang menjadi gagasan penulis ini dapat bermanfaat dan berkah.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Choirul, *Gerak Langkah Pemuda Ansor seputar sejarah Kelahiran*, Jakarta: PT Duta Aksara Mulia, cetakan kedua, 2010.

Anam, Choirul, *Pertumbuhan Dan Perkembangan NU*, Jakarta: PT Duta Aksara Mulia, cetakan ketiga, 2010

Anwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. I, 1997.

Asmawi, *PKB Jendela Politik Gus Dur*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1999.

Amin, Farih, Junaedi, *Buku Pelajaran ke-NU-an dan Tentang Ahlussunah Waljamaah (ASWAJA)*, Semarang: LP Maarif NU Jawa Tengah, Cet ke-3, 2014.

Aunur Rahim Fakhri, *Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: tim UII Press 2001.

Budiardjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013

Greg Barton dan Greg Fealy, *Tradisionalisme Radikal Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara*. Yogyakarta: 1997

Hasibullah Satrawi, *Kepemimpinan NU Masa Kini, Nasionalisme Dan Islam Nusantara*, Jakarta: 2015

Khoirul Ummatin, *perilaku Politik Kiai*. Yogyakarta: 2002.

Kusuma, Erwien, *yang muda yang berkiprah, Gerakan pemuda Ansor dan politik Indonesia masa demokrasi liberal hingga masa reformasi (1950-2010)*, Bogor: kekal Press, 2012

Malik Madani, *Politik berpayung Fiqh*, Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2010

Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Mun'im Abdul Al-Hafni, *Ensiklopedia Golongan, Kelompok, Aliran, Madzhab, Partai, dan Gerakan Islam seluruh Dunia*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009.

PBNU, *hasil Mukatamar NU ke-27 Situbondo, Nahdlatul Ulama kembali ke khittah perjuangan 1926*, Jakarta; 1986.

PD-PRT GP. Ansor PO BANSER (dalam Diklatsar Angkatan VIII), Semarang, 2015.

Panduan Administrasi dan Materi Pendidikan & Latihan, keputusan kombes XIV GP ansor. Jakarta, 2002.

Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-ruzza Media, 2014.

Rici Ftriyanto, *GP Ansor dan Banser dukung Hendi-Ita*, Jawa Pos Radar Semarang, 4 Desember 2015.

Rizal Kurniawan, *GP Ansor dan Banser mendukung MaZu*, Jawa Pos Radar Semarang, 2 November 2015.

Ridwan, Nur, Kholik, *NU dan Bangsa 1914-2010: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Roziki Daman, *Membidik NU Dalam Percaturan pasca Khittah*, Yogyakarta: Gema Media, 2001.

Salamat Effendy Yusuf, Mohammad Ichwan Sjam dan Masdar Mas'udi, *Dinamika Kaum Santri Menelusuri jejak dan pergolakan Internal NU*, Jakarta: Rajawali, 1983.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D*, Bandung: ALFABETA, 2014.

Surat Keputusan Pimianan Cabnag GP Ansor kota Semarang 2014.

Tolhah Muhammad Hasan, *Ahlussunah wal Jama'ah dalam persepsi dan tradisi NU*, Jakarta: lantabora Press. 2005, hlm. 369-371.

Hasil wawancara dengan Ali Munawir, tanggal 16 Mei 2016

Hasil wawancara dengan Jamhuri tanggal 21 Mei 2016

Hasil wawancara dengan Muhamad Busro tanggal 16 Mei 2016

Hasil wawancara dengan Sholkhan tanggal 18 Mei 2016

Hasil wawancara dengan Zamah Syari tanggal 15 Mei 2016

<https://id.bappeda.semarangkota.go.id> diakses tanggal 17 mei 2016

<https://id.m.wikipedia.org>, pemilihan umum wali kota semarang 2015.
Diakses tanggal 21 Mei 2016.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Chabib F

Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 13 Mei 1994

Alamat Asal : Dusun Mbatur Rt 01/ Rw 15, Kecamatan Kaloran Kab.
Temanggung

Alamat Tinggal : Jl. KH. Abdurrosyid, Bugen Rt 03/Rw 09. Tlogosari
Wetan, Pedurungan, Kota Semarang

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

No Hp : 0896 0192 3735

Riwayat Pendidikan :

- A. SDN 02 Kaloran Temanggung (Lulus Tahun 2006)
- B. MTS Al- Wathoniyyah Semarang (Lulus Tahun 2009)
- C. MA Al-Wathoniyyah Semarang (Lulus Tahun 2012)

Pengalaman Organisasi:

- A. Ketua CeSA MA Al-Wathoniyyah Semarang (2010-2011)
- B. Pengurus Ranting Tlogosari Wetan Gp Ansor Semarang (2013-2015)
- C. Ketua Lembaga Dakwah Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah
(2013-2015)